



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPRRI
DENGAN
DIRUT PT PERTAMINA (PERSERO)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 6 April 2022
Waktu : Pukul 16.34 WIB s.d.17.16 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPRRI Gedung Nusantara I lantai 1, Jakarta
- Ketua Rapat : Maman Abdurrahman, S.T./F-PG/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
- Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPRRI
- Acara : 1. Penjelasan tentang Ketahanan BBM,
2. Penjelasan Kinerja Pertamina Hulu,
3. Persiapan Kilang menghadapi Lebaran,
4. Progres GRR Tuban, dan
5. Lain-lain
- Hadir : 40 orang anggota hadir dari 53 orang anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPRRI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
2. Dony Maryadi Oekon/F-PDI Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-PG/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
4. Bambang Haryadi, S.E./F-P.Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
5. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/ Wakil Ketua Komisi VII DPRRI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

- 7 orang anggota dari 11 anggota
1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.
 2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.

3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
5. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
6. Ribka Tjiptaning Ploretariyati
7. Novri Ompusunggu

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

7 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam
2. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin
4. Ir. Lamhot Sinaga
5. H. Hasnuryadi Sulaiman, S.E., M.A.B.
6. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA., M.Sc.
7. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang anggota dari 6 anggota:

1. R. Wulansari
2. Ramson Siagian
3. H. Iwan Kurniawan, S.H.
4. H. Nurzahedi, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., BE(Hons), M.Eng.Sc.
3. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

4 orang anggota dari 6 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc., M.Sosio.
2. H. Ali Ahmad
3. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.
4. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Muhammad Nasir
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.
4. Rusda Mahmud
5. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
2. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
3. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Dirut PT Pertamina Persero (Nicke Widyawati)
2. Dirut PT Pertamina Hulu Energi (Budiman Parhusip)
3. CEO *Commercial & Trading Subholding* (Alfian Nasution)
4. Dirut Kilang Pertamina Internasional (Taufik Aditiyawarman)

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Sampai hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan juga tak lupa shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, sempurna sudah ya, bulan puasa, Ramadhan ya.

Yang terhormat rekan-rekan saya anggota Komisi VII yang sudah hadir dalam forum ini, wabil khusus Pak Pimpinan Komisi VII juga Mas Eddy Suparno dari Fraksi PAN,

Yang terhormat Ibu Dirut Pertamina beserta rombongan, Hadir di sini ada beberapa dirut ada Dirut Kilang, Dirut Pertamina Hulu Energi, Direktur Keuangan, ada Dirut Patra Niaga, banyak dirut, kalau Dirut Bu Nicke dirut apa Bu, jadi Direktur Utama yang paling utamalah Bu Nicke.

Selamat datang Pak, salam hormat semuanya.

Selamat menjalankan ibadah puasa.

Jadi, *alhamdulillah* Pak, jadi kita agak *slow-slow* sedikit tapi yang penting pasti. Bu, pada kesempatan kali ini saya perkenalkan dulu bahwa di kami telah hadir anggota baru Pak Hendrik Sitompul dari Fraksi PDIP, ini kok tulisannya PDIP jadi kesalahan bukan pada Pimpinan, kesalahan kepada, jadi dari Fraksi Demokrat. Ini beliau termasuk Bu, jadi tolong Pak Alfian, Bapak-bapak semua diperhatikan dan diingatingat betul wajahnya, jadi jangan sampai miskomunikasi.

Ya, saya atas nama Pimpinan Komisi VII dan Pimpinan Sidang pada kesempatan kali ini kita mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pertamina terkait 3 agenda, yaitu:

1. Penjelasan tentang ketahanan BBM dalam rangka untuk menuju lebaran,
2. Penjelasan mengenai kinerja Pertamina Hulu, dan
3. Persiapan kilang menghadapi lebaran.

Saya mohon persetujuan forum, rapat ini kita terbuka atau tertutup? Terbuka ya. Saya mohon izin rapat ini terbuka.

(RAPAT : SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.34 WIB)

Lalu, agendanya kurang lebih sekitar berapa lama kita 2 jam? 2 jam ya, kita anggap sekarang jam setengah 3, setengah 4, kita upayakan jam 4 sudah selesai, setuju ya? Namun, kalau nanti kira-kira ada tambahan-tambahan ya kita diperpanjang sampai jam setengah 5, setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Ya, Bu Dirut, saya pikir rapat ini menjadi sangat penting terkait beberapa isu di mana dalam waktu dekat kita akan menghadapi Lebaran Idul Fitri, di mana kami Komisi VII tentunya semua berkepentingan yang paling besar dan juga saya rasa bersama-sama dengan Pertamina juga untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terkait bahan bakar minyak kita, baik itu yang *fuel* maupun yang gas itu bisa aman. Artinya masyarakat jangan sampai nanti pada saat nanti menjelang lebaran tiba-tiba kejadian nggak bisa mendapatkan bahan bakar minyak untuk kebutuhan memasak mereka di rumah dalam rangka menyambut lebaran. Artinya apa? Rapat ini kurang lebih nanti akan berputar kurang lebih bicara tentang hal itu. Artinya kami Komisi VII berkepentingan sekali untuk memastikan bahwa pasokan menjelang lebaran itu aman.

Nah, jadi saya pikir nanti teman-teman Pertamina tolong di, kurang lebih presentasi pembahasannya kurang lebih di situlah. Saya rasa kita langsung saja ya, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pertamina dan wabil khusus Bu Dirut yang paling utama di Pertamina untuk menyampaikan dan menjelaskan kurang lebih seputar permasalahan BBM menjelang lebaran ini.

Silakan, Bu.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Baik.

terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat, RDP Komisi VII, Bapak Pimpinan dan juga Bapak/Ibu anggota Komisi VII DPRRI, serta Rekan-rekan direksi dan manajemen Pertamina Group yang hadir mendampingi saya siang hari ini.

Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan karena ini agendanya ada menyangkut 3, jadi yang pertama adalah Pak Alfian. Nanti akan menyampaikan bagaimana rencana detail kita untuk mengamankan pasokan dan juga distribusi kepada masyarakat, khususnya BBM dan LPG dalam bulan Ramadhan dan juga nanti Idul Fitri, baik itu.

KETUA RAPAT:

Oh iya Bu, sedikit *sorry* saya potong.

Terkait yang agenda Tuban tadi kita bersepakat untuk kita bahas di momen khusus saja Bu. Jadi, saya pikir biar forum ini kita fokus bahas mengenai BBM. Jadi, yang GRR Tuban nanti aja kita agenda khusus karena teknik sekali itu.

Terima kasih Bu.

Silakan.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Termasuk yang..(*suara tidak jelas*)..juga nanti khusus aja ya Pak, terima kasih.

Kami nanti akan menyampaikan itu Pak, barangkali secara garis besar kami sudah koordinasi juga dengan pemerintah. Di mana setelah 2 tahun ini tidak ada mudik gitu ya, tidak ada mobilisasi yang masif selama lebaran. Tahun ini, ini kita kita prediksi akan ada kenaikan yang luar biasa dengan jumlah kendaraan yang sangat besar. Jadi, kita juga sudah membuat antisipasi, stok itu kita tambah. Jadi, kalau kita lihat nanti mungkin Pak Alfian bisa menjelaskan dari grafik harian, jadi kami memprediksi harian itu kenaikan gasolin khususnya, itu antara 22 sampai 36% baik itu arus mudik maupun arus balik karena juga ada masa liburan.

Oleh karena itu, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ini kenaikannya untuk gasoline itu sekitar 11%, untuk gas oil itu naik sekitar 24% Pak tahun ini stoknya. Untuk LPG ini stok tidak terlalu banyak karena tahun lalu pun sebetulnya memang sudah cukup tinggi.

Mungkin kita bisa langsung masuk Pak ke *over view*-nya seperti apa. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya Pertamina ini membentuk satgas Pak, Satgas Ramadhan dan Idul Fitri yang kita sebut Satgas Rafi untuk tahun 2002 ini. Dan satgas itu secara formal biasanya kalau dari tanggal sekarang mulai Senin depan sampai dengan seminggu setelah lebaran. Namun, dengan situasi hari ini, di mana *recovery* dari pandemi ini terjadi lebih cepat sehingga mobilitas

dan aktivitas itu meningkat tajam *demand* dari solar itu meningkat sampai 20-30%. Oleh karena itu, satgas ini kita mulai lebih awal Pak. Jadi, satgas ini sudah 2 bulan, eh 2 minggu beroperasi, setiap hari kami lakukan *monitoring* atas *supply-demand* dan juga distribusi untuk seluruh jenis BBM, khususnya adalah BBM subsidi yaitu JBT dan juga JBKP.

Ini yang menjadi *concern* kami, Pak. Dan kita sudah menggunakan digitalisasi SPBU untuk melihat stok perjenis produk per SPBU. Mungkin secara garis besar kami sampaikan. Jadi, dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan *recovery* yang lebih cepat, memang kita merasakan betul *demand* ini naiknya tajam, khususnya adalah yang terkait dengan solar karena kaitan dengan logistik menjelang Idul Fitri ini. Dan untuk itu kemudian Pertamina membentuk satgas secara formalnya untuk yang Satgas Rafi saja itu mulai 11 April ya, Senin, minggu depan sampai dengan 10 Mei. Namun, sudah 2 minggu ini satgas untuk memantau *supply-demand* dan distribusi dari BBM dan LPG ini sudah berjalan. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya ini kami berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, kemudian Kemenhub, Kepolisian untuk Jasa Marga untuk tol, TNI dan juga PT Telkom. Jadi koordinasi ini kita lakukan secara nasional dan setiap hari kita melakukan koordinasi, mulai tanggal 11 nanti.

Untuk BBM dan juga LPG ini kami mensiagakan seluruh infrastruktur yang ada, yang kami miliki. Jadi ada 114 terminal TBBM, 23 terminal LPG, SPBU ini 7.400 termasuk nanti juga Pertashop, Pertashop ada sekitar 4.000, juga ada SPBE, agen LPG dan juga DPPU. Jadi, semuanya kita operasikan, malah yang SPBU sekarang kita operasikan yang menjual solar subsidi ini 24 jam Pak, khususnya daerah-daerah industri agar tidak terjadi antrian di sana. Selain itu, kita juga ada menambah layanan BBM, khususnya di jalur-jalur yang, jalur mudik dan arus balik, ini kita tambah seperti di tol, juga di daerah wisata karena biasanya juga daerah wisata ini menjadi banyak pengunjungnya, juga di jalan-jalan lintas utama. Kami siapkan ada SPBU siaga, jadi kami memiliki mobil dispenser, juga pertashop-pertashop kami pasang untuk menambah *outlet* gitu ya agar masyarakat nanti tidak harus mengantri di *rest area* di tol misalnya itu kita pecah dulu antriannya di sebelum itu.

Kita juga ada memberikan motoris yaitu kendaraan roda dua yang menjemput bola, yang nanti di-*connect* dengan *call center* 135. Jadi, kalau ada kendaraan di tol atau di mana pun yang sudah kehabisan bensin sebelum tiba di SPBU maka bisa menelpon ke 135 dan motoris kami akan langsung untuk mengirim BBM ke sana, juga mobil tangki yang ditambahkan dengan *flow meter* itu juga *standby*. Demikian juga dengan kesehatan di beberapa titik kita beri sebagai tambahan layanan dari kami. Kamu juga operasikan yang kita sebut *integratif enterprise data center and command center*, jadi ini 24 jam layanan *real time online* untuk seluruh fasilitas, dari hulu sampai hilir. Jadi kami bisa memantau dari *command center*, khususnya kalau kaitan ini adalah ketika ada stok-stok di TBBM maupun di SPBU yang kita lihat kritis sehingga ini bisa langsung otomatis kita kirim. Jadi, kita juga mengantisipasi kelambatan dari pemilik SPBU untuk mengirimkan DO, maka Pak Alfian juga membuka fasilitas *open* kredit untuk para SPBU ini sehingga kalau terjadi ada stok kritis bisa otomatis DO ini kita keluarkan untuk dikirimkan BBM-nya ke SPBU terkait.

Kami sendiri seluruh direksi dan dari *holding* maupun *subholding* ini mengecek langsung seperti hari ini Pak Mulyono ini ke Jawa Timur Pak, mengecek kesiapan dan juga pasokan yang ada di seluruh SPBU dan TBBM di Surabaya dan sekitarnya. Besok kami juga akan ke daerah lain, jadi ke Kaltim, kemudian ini semua akan menyebar terus untuk memastikan. Jadi, selain satgas, direksi juga kami minta untuk turun langsung mengecek kondisi ini.

Itu secara garis besar, mungkin selanjutnya atas izin Pimpinan, saya akan mempersilahkan Pak Alfian selaku CEO dari *Commercial and Trading Subholding* untuk menyampaikan paparan detailnya.

CEO COMMERSIAL & TRADING SUBHOLDING (ALFIAN NASUTION):

Terima kasih Bu Dirut, mohon izin Bapak Pimpinan.

Bapak/Ibu seluruh anggota Komisi VII.

Mungkin *next slide*. Ini merupakan gambaran organisasi Satgas Ramadhan Idul Fitri 2022 yang udah kami bentuk Bapak dan Satgas Pertamina di kantor pusat ini terintegrasi dengan posko Satgas BPH Migas, posko Satgas Ditjen Migas, posko Satgas Kementerian Perhubungan, posko Satgas Kepolisian dan posko Satgas Telkom Indonesia. Ini kami bertukar data dan saling meng-*update* data setiap kali ada hal-hal tertentu dan juga laporan stok kami berikan dan kondisi stok di SPBU juga kami berikan ke masing-masing posko.

Pertamina juga membentuk posko satgas di masing-masing region, ada di regional Sumbagut, ada di regional Sumbagsel, regional Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim-Balikus, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Dan di masing-masing region ini mereka juga memiliki posko-posko satgas lainnya di tiap terminal-terminal yang ada di seluruh Indonesia untuk men-*support* pendistribusian BBM dan LPG. Lanjut.

Kami mengantisipasi tiga lokasi yang menjadi perhatian utama kami dalam Satgas Rafi 2022 ini, yang pertama adalah jalur lintas utama, lokasi wisata dan daerah rawan bencana. Untuk jalur-jalur lintas utama, jalur logistik yang menjadi perhatian kami karena dari tahun ke tahun merupakan daerah yang rawan untuk terjadinya kemacetan dan sebagainya. Pertama, lintas Timur Sumatera yaitu Medan, Riau, Jambi, Palembang. Lintas Barat Sumatera, Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, jalur tol Trans-Sumatera, Bakauheni, Palembang, jalur tol Trans Jawa, Jakarta-Probolinggo, jalur selatan Cikampek, Bandung, Tasik, Jogja. Jalur utara Jawa, kemudian Gilimanuk, Merak, Bitung Kalimantan Timur dan Kalselteng serta Sulawesi Selatan dan Tenggara. Di mana di jalur-jalur ini tentunya kami menempatkan *treatment-treatment* khusus bentuk pelayanan seperti halnya tambahan siaga SPBU maupun modular SPBU. Di samping itu juga mengantisipasi lokasi wisata dan daerah rawan bencana, seperti yang tertera di *slide* ini. Lanjut.

Berikut merupakan gambaran *overview* kondisi stok BBM dan LPG. Pada dasarnya stok BBM dan LPG pada saat ini, itu sangat aman. LPG berada di posisi 16,3 hari, kerosin 47 hari, pertalite di 16,5 hari, pertamax 37 hari, pertamax turbo 67 hari, 61 hari mohon maaf, solar 22 hari, dexlite 2,4 hari, namun dexlite ini merupakan komponen nantinya di-*blending* antara solar dan Pertamina dex, di mana Pertamina dex-nya posisinya adalah 24 hari serta avtur 33 hari. Jadi, secara umum kondisi stok hari ini adalah aman. Lanjut.

Kami juga memproyeksi kenaikan BBM dan LPG selama periode Satgas Rafi tahun 2022, di mana kami mengestimasi LPG itu nanti akan naiknya 3%, kerosin ada kenaikan 0,8%, yang relatif tinggi nantinya itu ada di pertalite itu 11%, pertamax akan turun 15%, turbo turun 27%, solar memang turun 5% namun menjelang hari H-7 ketika truk-truk dilarang.

KETUA RAPAT :

Pak Alfian, mohon maaf sedikit aja. Ini yang Bapak maksud LPG ini LPG nonsubsidi ya?

CEO COMMERSIAL & TRADING SUBHOLDING (ALFIAN NASUTION):

LPG keduanya Pak, subsidi dan nonsubsidi.

KETUA RAPAT :

Kenaikan *volume* ya, bukan kenaikan harga ya? Nggak, maksudnya biar kita klarifikasi dulu takut ini sensitif dalam situasi ini.

Terima kasih, silakan Pak. Jadi, artinya ini bisa saya bilang kenaikan *volume* LPG subsidi dan nonsubsidi.

Oke, terima kasih.

CEO COMMERSIAL & TRADING SUBHOLDING (ALFIAN NASUTION):

Solar memang turun 5% namun ini juga diluar kebiasaan, biasanya menjelang lebaran itu turun 10%. Namun, melihat tingginya aktivitas kendaraan atau logistik saat ini di mana kita telah *over* 11%, kami memprediksi nanti hanya turun 5% ketika truk-truk maupun industri tidak beroperasi lagi. Sementara avtur diperkirakan akan naik ke 11,6%. Kemudian lanjut.

Pertamina menyiapkan layanan tambahan selama periode satgas tahun 2022 ini, kita menyiapkan sekitar 1.370 SPBU siaga. Jadi, SPBU siaga ini akan kami tempatkan di jalur-jalur potensial, jalur tol, jalur wisata, jalur logistik yang nantinya beroperasi 24 jam. Kemudian, kami juga menyiapkan 48.207 unit agen maupun *outlet* LPG siaga yang juga akan beroperasi 24 jam, kita menempatkan 37 unit kios Pertamina siaga berupa modular untuk layanan menyediakan pertamax dan dex series, juga ada 220 unit motoris yang akan beroperasi ketika adanya kemacetan di jalur tol, walaupun di jalur-jalur lainnya

yang di mana akan menimbulkan kemacetan apabila tidak segera ditangani ketika kendaraan kekurangan BBM.

Ada sekitar 144 unit mobil tangki yang akan kami *stanby*-kan di kantong-kantong SPBU untukantisipasi ketika SPBU kosong dan akan sulit dikirim dari depo terdekat, maka SPBU tersebut akan menggunakan mobil tangki mobil tangki kantong yang ada di SPBU terdekat. Kemudian kami juga akan menyediakan menyiapkan fasilitas kesehatan, baik itu ambulans maupun petugas medis yang akan meng-*handle* pemudik maupun operator-operator, serta awak mobil tangki. Lanjut.

Beberapa hal yang lain yang akan kami lakukan untuk pengamanan penyaluran BBM LPG selama masa Satgas ini adalah, pertama kami akan meningkatkan stok BBM maupun LPG baik itu di terminal BBM, LPG maupun di lembaga penyalur. Kemudian kami akan menambah mobil tangki, penyiapan mobil tangki *standby* BBM dan LPG. Kita akan menyiapkan juga BBM kemasan dan penyiapan LO kredit seandainya ada kehabisan LO dari pihak SPBU. Kemudian kita akan koordinasi internal dengan fungsi terkait di *holding* dan *subholding*, *upstream*, *refinery*, *shipping* dan supply distribusi, juga koordinasi ke pihak-pihak bank untuk tetap beroperasi ketika hari libur untuk penerimaan penyetoran BBM dari Hiswana Migas. Kemudian layanan khusus untuk lokasi yang tidak ada fasilitas SPBU dan jalur potensial seperti unit layanan pertamax series dan dex series, mobil dispenser dan kita juga sangat mengaktifkan motoris melalui DS atau layanan 135.

Digital SPBU kita optimalkan untuk *monitoring* stok SPBU serta mengantisipasi apabila terjadinya krisis dan kita juga menggunakan transaksi *cashless*. Komunikasi dan koordinasi eksternal dengan Kemenhub, Polri, Kementerian ESDM dan BPH, Telkom serta Jasa Marga. Kemudian kita juga melakukan himbauan sosialisasi di SPBU melalui sosmed dan sebagainya untuk melaksanakan protokol covid selama perjalanan.

Ini merupakan, *next slide* merupakan gambaran kita seluruh direksi komit untuk memantau langsung persiapan di lokasi, baik itu untuk persiapan arus mudik maupun isu antrian solar maupun pertalite. Di mana seluruh direksi *holding* maupun *subholding* terlibat kunjungan ke, baik itu Sumatera, Kalimantan maupun area Jawa serta Sulawesi dan selama kami melakukan peninjauan stok di SPBU cukup dan beberapa antrian masih dalam batas normal.

Mungkin itu Bapak Pimpinan yang bisa kami sampaikan, Ibu Dirut kami kembalikan.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Terima kasih Pak Alfian.

Demikian Bapak Pimpinan, materi yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Dirut dan Pak Alfian.

Ada lagi Pak? Cukup ya selanjutnya kita mau buka dulu forum dialog khusus mengenai kesiapan Pertamina terkait lebaran atau kita buka kasih dulu ruang kepada Pak Direktur Hulu PHE dan kilang ini juga ya, jadi biar sekaligus juga ya. Ya gimana Pak Mul? Ya, ini Pak Mulyanto, ya sekaligus ya, suara kebatinan sudah saya tangkap Pak.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Iya Bapak Pimpinan, mungkin nanti kami minta dari Hulu dan juga Kilang untuk menyampaikan terkait juga kesiapannya untuk men-*support* BBM dan *supply* energi selama masa Ramadhan, Idul Fitri. Jadi, nanti Pak Budiman menyampaikan tentang produksi, menjamin bahwa *supply crude* ke kilang ini aman. Kemudian nanti Pak Taufik akan menyampaikan produksi dari kilang ini yang kita upayakan semaksimal mungkin untuk bisa men-*support* tadi rencana *supply* Pak Alfian yang kita sudah prediksi kenaikannya untuk masing-masing jenis produk.

Monggo silakan Pak Budiman terlebih dahulu.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Budi.

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (BUDIMAN PARHUSIP):

Terima kasih, Bu Dirut.

Pimpinan Komisi VII, Bapak-bapak Pimpinan Komisi VII dan Bapak/Ibu anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang kami hormati.

Izinkan kami memaparkan mengenai *subholding upstream* atau *subholding* hulu Pertamina kinerjanya dan pencapaian di tahun 2021 dan apa rencana-rencana kita di tahun 2022.

Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan operasi di Hulu Pertamina dikelola oleh Pertamina Hulu Energi, di mana untuk daerah pengelolaan operasi di domestik atau Indonesia itu kita bagi atas empat regional, yaitu *region 1* di Sumatera, *region 2* di Jawa, *region 3* Kalimantan, *region 4* itu Indonesia bagian timur dan *region ke-5* adalah bagian pengelolaan operasi kita di internasional. Nah, dengan sistem pengelolaan regionalisasi ini kami telah mendapatkan beberapa manfaat di antara lain bahwa integrasi wilayah-wilayah kerja di dalam suatu *region* itu berjalan dengan baik. Di mana pengelolaan operasi bisa dilakukan dengan sistem *borderless operation* dan ada pemakaian bersama fasilitas-fasilitas dan juga integrasi pengembangan-pengembangan di antara wilayah kerja itu berjalan dengan baik, sehingga terjadi *cost*

effectiveness untuk kita melakukan optima optimasi di dalam operasi dan optimisasi di dalam pengembangannya.

Selain itu juga bahwa *upstream subholding* Pertamina ini mengelola 2 *services company* yaitu PDSI dan Elnusa dan Badak LNG yaitu untuk melakukan operasi di-*services* kita untuk pengeboran dan juga beberapa konstruksi dan juga untuk melakukan LNG di Kalimantan Timur.

Next selanjutnya, perlu kami paparkan di sini *slide* selanjutnya. Nah, untuk pencapaian kinerja di tahun 2021 secara total bahwa *upstream subholding* produksi minyak dan gas total domestik dan internasional mencapai 897.000 *barel oil ekuivalen perday*. Di mana di tahun 2021 kami telah melakukan pengembangan pengeboran sumur pengembangan sebanyak 350 sumur dan juga 12 sumur eksplorasi dan melakukan hampir 16.500 program *untuk well services* dan *well intervention* untuk meningkatkan produksi dan juga melakukan 472 *workover*. Jadi, cukup banyak program-program yang kita lakukan di tahun 2021, selain itu juga kita melakukan beberapa program-program digitalisasi dan juga aktif melakukan optimasi-optimasi *operating cost* melalui program kita yang kita sebut *optimus*. Di mana dengan program-program ini kita mengusahakan, mengupayakan bahwa *operating cost* kita bisa lebih efektif. Dan yang, satu hal lagi yang utama adalah di bulan Agustus 2021 seperti Bapak/Ibu ketahui bahwa alih kelola Rokan yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan itu berjalan dengan baik. Di mana hal itu merupakan suatu pekerjaan yang cukup signifikan, yang mengalihkelolakan Rokan ke dalam wilayah kerja Pertamina.

Untuk tahun 2022, kami melakukan program yang justru lebih masif lagi yang lebih besar. Target produksi kita domestik dan internasional itu meningkat, akan meningkat hampir mencapai 15% yaitu kita akan menargetkan produksi total produksi sebesar 1.047.000 *barel oil ekuivalen perday*. Dan jumlah sumur pengembangan yang akan kami bor itu meningkat lebih daripada 2 kali, di tahun 2021 sebanyak 350 sumur dan kami akan menargetkan bahwa jumlah sumur yang akan kita bor, sumur pengembangan itu lebih dari 800 sumur yaitu 813 sumur dan sumur eksplorasi juga meningkat lebih dari 2 kali. Sumur eksplorasi kita akan tingkatkan menjadi 29 sumur, demikian juga dengan *workover* dan *well services*. Nah, program-program yang cukup masif ini, ini tentu sejalan dengan kenaikan harga minyak sehingga kita bisa memastikan bahwa produksi kita bisa meningkat, jumlah cadangan juga bisa kita tingkatkan dan operasi pengelolaan sumur ini tentu terus-menerus harus kita upayakan agar dia tetap *cost* efektif dan artinya upaya-upaya yang kita lakukan di tahun 2021 untuk melakukan pengolahan operasi dengan *cost* efektif akan kita lanjutkan di tahun 2022.

Nah, sebagai gambaran realisasi di akhir tahun 2022 untuk jumlah produksi minyak di total domestik dan internasional itu sebanyak 524.000 *barel* itu sekitar 117% dibandingkan dengan tahun 2021. Dan demikian juga dengan jumlah produksi gas kita itu 101% di Februari 2022 ini dibandingkan dengan 2021 yaitu sebesar 2.634 MM juta kaki *cubic feet* per hari dibandingkan dengan 2021, 2.615 juta kaki *cubic feet*.

Nah, ada pencapaian yang cukup baik di awal tahun 2022 ini di mana kita di bulan Februari ini telah membor sumur eksplorasi sebanyak 2 dan yaitu Manpatu-1x *well* dan Sungai Gelam Timur-001 *well*, Manpatu itu ada di PHM dan Sungai Gelam Timur ini ada di Sumatera di daerah Jambi, yang keduanya merupakan sumur *discovery*. Jadi, kalau Manpatu ini sumur *discovery* untuk gas ada kondensatnya, sedangkan Sungai Gelam Timur ini adalah sumur minyak dan pencapaian estimasi kami bahwa *discovery* ini akan berjumlah sekitar 30 juta barel *oil ekuivalen* jumlah cadangannya, saat ini masih dalam tahap evaluasi. Jumlah sumur pengembangan yang sudah selesai di bor di Februari ini ada 90 sumur dan jumlah *workover* 97 sumur dan *well intervention*, *well services* sebanyak 4.745 sumur.

Jadi, di 2022 ini program kami akan sangat cukup besar, masif dan optimasi-optimasi yang kami lakukan di tahun 2022 ini untuk menjamin bahwa memastikan target itu bisa dicapai dan meningkatkan produksi bahwa kita akan meningkatkan rencana kerja *workover* dan *well services* dan juga mencoba mengakselerasi beberapa rencana kerja yang kita programkan di 2023 untuk bisa dilakukan di tahun 2022. Dan kami juga melakukan beberapa reaktifasi sumur-sumur yang di suspend karena di tahun-tahun sebelumnya tidak komersial, tidak ekonomi akan tetapi dengan harga minyak yang sekarang sumur-sumur tersebut bisa kita buka kembali.

Selanjutnya, *slide* selanjutnya kami mau mencoba menggambarkan di *slide* selanjutnya. Nah, di *slide* selanjutnya bisa kita lihat apabila kita bandingkan program di tahun 2020, 2021, 2022 dan apa yang akan coba kami lakukan juga di 2023 bahwa program kita ini, baik eksplorasi maupun pengeboran sumur eksploitasi akan meningkat terus. Tadi sudah kami paparkan untuk sumur seperti contohnya sumur eksploitasi di tahun 2022 sebanyak 813 sumur, kita rencanakan untuk 2023 kita akan tingkatkan lebih dari 1.000 sumur, 1.086 sumur di tahun 2023 akan kita lakukan. Demikian juga dengan sumur eksplorasi di tahun 2022, 29 sumur dibandingkan dengan tahun 2021, 12 sumur dan di tahun 2023 akan kita programkan untuk membor sumur eksplorasi sebesar 32 sumur. Nah, hal-hal ini kita lakukan agar bisa kita pertahankan dan kita naikkan produksi kita di tahun 2022 dan akan lebih meningkat lagi untuk tahun 2023. Jadi, dengan kenaikan harga minyak ini bahwa kesempatan untuk melakukan program-program yang lebih banyak itu menjadi lebih terbuka. Dan perlu kami paparkan di sini bahwa semua produksi domestik kita minyak itu dikirimkan ke kilang domestik yang dimiliki oleh KPI.

Lanjut. Nah, sebagai penutup, bisa kami katakan bahwa memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak, kami melakukan akselerasi rencana kerja dan juga melakukan optimasi-optimasi tata waktu. Sedemikian, hingga bahwa produksi minyak kita dan penambahan cadangan akan bisa kita pastikan. Kegiatan eksplorasi juga kami lakukan terus-menerus untuk mendukung *sustainability* produksi minyak dan juga *growth* daripada perusahaan dan pengembangan cadangan-cadangan yang ada di *upstream subholding*. Dan sinergi tetap dilakukan untuk melakukan optimasi-optimasi sehingga kita bisa melakukan beberapa optimasi di biaya-biaya pengembangan dan biaya-biaya operasi untuk bisa peristiwa terus-menerus melakukan pengoperasian yang lebih baik. Tak lupa satu hal yang sangat penting sekarang ini kami juga

melakukan apa yang disebut dengan *green* komitmen, di mana memang kita melakukan peningkatan produksi minyak dan gas akan tetapi kita juga melakukan penerapan strategi dekarbonisasi. Ini kita tetap melakukan usaha-usaha untuk penurunan emisi nasional, walaupun kita memproduksi minyak dan gasnya. Hal ini kita lakukan dan kita melakukan pencapaian-pencapaian seperti pengembangan-pengembangan energi terbarukan, pemasangan-pemasangan solar panel di daerah-daerah wilayah operasi kita itu akan kita tingkatkan dari tahun ke tahun.

Demikian kira-kira pemaparan kami mengenai kinerja *subholding upstream* yang pada intinya bahwa tahun 2022 ini program yang ada di *subholding upstream* ini lebih masif dan agresif dibandingkan tahun 2021 dan akan terus dilakukan untuk tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang.

Demikian pemaparan kami Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu anggota Komisi VII DPR yang kami hormati.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Budiman.

Ini yang terkait agenda kilang itu Bapak persiapannya yang Tuban Pak ya, di GRR Tuban atau ada yang lain? *Oke*. Ya, *oke* silakan Pak kalau, jadi tolong nanti yang dipresentasikannya, pokoknya yang Tuban nanti kita agendakan yang selanjutnya Pak, karena detail sekali itu kalau di sini kurang pas.

Silakan, Pak.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Sidang Komisi VII dan juga Bapak/Ibu anggota Komisi VII yang saya hormati,
Bu Dirut dan jajaran BOD yang hadir pada kesempatan siang ini.

Izinkan saya menyampaikan kinerja kilang sebelum dan mungkin sesudah *subholding refining and petrochemical* ya Pak ya. Saya mulai mungkin dari kinerja saya dulu, kinerja sebelum 2020 dan saat ini. Jadi, secara *intake* kilang ya ada 4 parameter, jadi *intake* kilang, *yield total* dan *yield valuable* kilang, kemudian energi intensif indeks dan *plant availability factor*. Jadi dari sisi *intake* kilang dari grafik itu di per 2022 terus meningkat dibanding dengan sebelumnya, jadi di angka 115% artinya itu sudah baik ya. Kemudian *yield total* dan *yield valuable*-nya ada di angka 94%, kemudian energi intensiti indeksnya

ada di kisaran 107,8 di mana itu adalah angka yang lebih baik dibandingkan dengan industri. Kemudian *plant availability factor* 99,5%, ini artinya apa? Artinya persen *intake* kilang kita berada di rata-rata 100% ini bagus, Pak. Kemudian realisasi *intake* kilang 2021 juga 312 juta barel artinya *crude*, kemudian *intermediate*-nya 12,4 juta barel. Kemudian *yield total* kita, kilang-kilang kita riil rata-rata 94% dengan yang *valuable* mencapai nilai 81,9% di tahun 2021 dan merupakan capaian tertinggi selama ini di atas *benchmark* standar referensi Solomon yaitu 78,3%.

Sedangkan, di *energy intensity index* kilang secara *overall* mencapai 107,8 atau lebih baik dari capaian 2020 dan 2021. Kemudian untuk meningkatkan *fund availability factor* tentunya kita juga melakukan preventif dan prediktif, serta *turn around* di kilang, sehingga saat ini kilang *fund availability factor*-nya mencapai 99,5%. Bisa dilanjut.

Nah, ini adalah gambaran umum capaian di 2021 di kinerja kilang di Pertamina, di mana *yiled valuable factor* produknya sendiri mencapai 104,6% jadi dibanding lebih tinggi daripada 2020. Kemudian *gross refining margin*-nya 2,6 kali daripada 2020. Kemudian tadi *plant availability factor* 100,7% dan *energy intensity index*-nya 101,3%, jadi *alhamdulillah* kinerja di 2021 kilang kami lebih baik dibanding 2020.

Kemudian bagaimana, next, strategi kami untuk meningkatkan terus kinerja kilang ke depan. Yang pertama ada *managing system refineries*. Jadi, *refinery-refinery* yang sudah ada kami kelola supaya tetap efisien, kemudian produksinya juga *excellent* dengan apa program peningkatan keandalan, kemudian peningkatan energi efisiensi dan optimalisasi *crude* dan produk. Di mana untuk peningkatan keandalan kami lakukan digitalisasi kilang dan implementasi *services agreement*. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi energi tentunya kita melakukan PLN-nisasi kilang dengan harapan yang tadinya mungkin menggunakan *power plant gas*, gasnya bisa diolah, bisa menjadi sel untuk menambah *revenue*. Kemudian pemanfaatan eksternal gas, kemudian implementasi EBT di area kilang. Kemudian optimalisasi *crude* dan produk tentunya bagaimana pemilihan *crude* yang ekonomis, kemudian serta memaksimalkan *high available* produk sesuai dengan *market demand* yang *input*-nya dari timnya Pak Alfian Pak CMT.

Kemudian untuk strategi pertumbuhan kapasitas, kualitas dan kompleksitas kilang tentunya kita ada pengembangan kilang *existing*, serta pengembangan pembangunan satu kilang baru terintegrasi yaitu GRR untuk memenuhi kebutuhan *demand* dalam negeri dan menekan *current account deficit*. Kemudian juga peningkatan kapasitas pengolahan *crude* yang sebelumnya 1 juta barel atau saat ini masih 1 juta barel per hari menjadi 1,4 juta barel per hari nanti pada saat RDMP Balikpapan dan Balongan selesai. Kemudian programnya apa? Jadi, RDMP (*Refinery Development Master Plan*), pengembangan 5 kilang *existing*, RDMP Plaju, Dumai, Cilacap, Balikpapan dan Balongan untuk peningkatan *competitiveness* kilang, kemudian penambahan kapasitas di RDMP yaitu 125 ribu barrel per hari.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, coba dibagiin dulu bahannya ini kita nggak pegang ini bahannya, yang Bapak ini.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Yang tadi itu kan Pak, yang awalnya yang GRR Tuban ya Pak ya.

KETUA RAPAT:

Jadi, tadi begini Pak Gunhar, nggak apa-apa tapi yang ini silakan aja nanti dikoordinasi dengan sekretariat disiapkan aja. Jadi, memang ini tadi kita sebelum rapat ini kita minta untuk yang materi Tuban diagendakan pada agenda rapat khusus saja karena detail dan teknis. Jadi, kita mau lebih melihat kepada kebutuhan kilang dalam mensuplai agenda acara untuk lebaran nanti. Iya jadi makanya kita agendakan nanti, bukan, bukan yang Tuban tadi, yang ini yang kita ini, nah ini nanti kita akan minta selanjutnya. Tolong nanti dari sekretariat koordinasi aja dengan teman-teman Pertamina untuk di-*print*-kan tambahan untuk dibagikan ke teman-teman anggota.

Terima kasih.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Izin, bisa dilanjutkan Pak Ketua?

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Ini Direktur Utama PT Kilang, dirut ya? Oh ganti lagi, bukan Pak Joko? Ya, baru ganti berapa hari?

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Tanggal 15 Maret Pak Ramson ya.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Oh baru? Yang tadinya direktur? Oh jadi sekarang bosnya kilang?

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Ya, sebagai Dirut Kilang, Pak.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Karena saya tahu kilang sih, semua kilang Pertamina saya tahu, oh bosnya kilang sekarang, oh Pak Joko udah ganti, oh sebentar semuanya pada ganti dong nih.

Oke, silakan Pak Ketua terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini memang kalau udah urusan kilang-kilang ini memang agak ngeri-neri sedap.

Silakan Pak lanjut, lanjut.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITIYAWARMAN):

Izin melanjutkan Pak.

Baik.

Mungkin langsung aja ke ini aja, ke halaman berikutnya bagaimana kesiapan kami untuk mendukung kebutuhan BBM di masa puasa dan hari raya. Saya akan menyampaikan kira-kira profil produksi kilang di triwulan pertama 2022. Yang pertama mungkin dari sisi grafik sendiri seperti pertalite itukan produksi di atas ya di atas yang rencana. Artinya akan ada kebutuhan tambahan pertalite dan pertamax ini di atas hampir 3.000, positiflah artinya kan lebih dari apa yang bisa kita rencanakan sebelumnya. Nah, sementara mungkin di sini di pertamax turbo-nya itu kan berkurang, nah memang mungkin *switching* produksi ke produk-produk yang kebutuhannya lebih banyak sebagai *input* daripada *marketing*, Pak. Demikian juga dengan avtur BTW 1 itu lebih baik atau lebih banyak kita diproduksi. Kemudian *low sulfur marine fuel oil* juga diproduksi lebih banyak, kemudian pertamina dex dan juga gas *oil* ya B0 dan B30. Artinya apa? Artinya dari produksi ini, dari grafik ini dari TW 1 sendiri ya kita yakin untuk dari kilang bisa mendukung untuk kebutuhan dari *marketing* timnya Pak Alfian yang tadi paparkan.

Kemudian, halaman berikutnya terkait *readiness* daripada kilang sendiri, belum ya, *slide* berikutnya mungkin. Baik, nah *slide* ini adalah menjelaskan bagaimana kesiapan kilang-kilang kami. Jadi, dari RU 2, RU 3, 4, 5, 6 dan 7 nah *unit primary*, *unit secondary*, *chemical*, katalis dan *absorbent* semua siap, artinya kesiapannya baik, kecuali ada di RU 6 sedang dilakukan *turn around* di *crude destilation unit* dan ada *turn around* di residu katalis *recovery*, yang rencananya akan kami selesaikan di akhir April ini Pak, sehingga bulan Mei itu akan siap untuk menambah atau memperbaiki *performance* daripada kilang di Balongan.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Jadi, Balongan lagi *turn around*.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Lagi *turn around*, Pak.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Sampai berapa lama itu Pak? Soalnya ini udah mau lebaran.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Kemarin, 45 hari, nggak tanggal 20, *crude destilation unit* tanggal 23 April selesai, jadikan menjelang lebaran bisa.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Percayalah Pak dirut baru mampu itu, sebenarnya nggak sulit itu *manage* itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi Pak, ini Mr. Bond. Jadi, Bapak harus hati-hati sama beliau-beliau ini spesialisasi urusan kilang-mengilang Pak.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Siap, Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi, kalau bulan puasa kita urusannya kolang-kaling Pak, tapi kalau sama beliau ini kilang-mengilang Pak jadi hati-hati Bapak-bapak.

Silakan Pak, nah ini kayak gini-gini Pak, tanda-tanda strip-strip ini diperiksa sama Beliau, Pak.

Silakan Pak.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Ya *monggo* Pak, kalau mau lihat ke Balongan ya kita nanti kawallah Pak dengan Pak Kadek.

KETUA RAPAT:

Salah Pak, jangan ditawarin Pak, nggak ditawarin aja datang, apalagi ditawarin.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Boleh saya tambahkan sedikit, mungkin Pak Taufik jelaskan *turn around* ini, ini dalam rangka kita menyelesaikan proyek RDMP Balongan. Setelah selesai ini Balongan akan bertambah kapasitasnya dari 125.000 barel menjadi 150.000 barel. Jadi, RDMP pertama yang selesai ya ini nanti tanggal 5 Mei ya Pak Kadek. Jadi, dalam rangka itu Pak, kita harus lakukan dulu *turn around* dan ini terjadwal untuk menyelesaikan proyek ini.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, sekali Bu Dirut yang paling utama dibantuin.

Silakan Pak.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITIYAWARMAN):

Baik.

Kita lanjutkan ke *slide* berikutnya. Nah, ini mungkin konteksnya sejalan dengan rencana ketahanan di bulan puasa dan hari raya. Jadi, produksi BBM, LPG dan kapasitas kilang kami ini Januari, Februari sampai dengan bulan Maret, Pak. Jadi, produksi sampai dengan bulan Maret solar dalam juta barel kira-kira gambarnya di bulan Maret 10 juta 475 atau 102,3% daripada rencana. Kemudian pertamax 1,421 juta barel di bulan Maret atau 105,8% daripada rencananya ya. Kemudian pertalite 4,028 juta barel sedangkan di sini ada kapasitas kilang dibawah tuh, kapasitas kilang rencananya berapa, realisasinya berapa di bulan Maret ini lebih besar ya produksinya, realisasinya daripada rencananya. Nah, dengan gambaran seperti ini *Insha* Allah untuk dari kilang domestik kita bisa mampu untuk mendukung kebutuhan daripada Pak Alfian yang tadi dipaparkan.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, nggak ada meledak-meledak lagi, petir-petir.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITIYAWARMAN):

Insy Allah, Pak, kami kawal jadi yang respon daripada yang kejadian beberapa kali sebelumnya sudah ditindaklanjuti. Contohnya yang di Cilacap untuk pemasangan tower untuk lightning protection sudah selesai, jadi sudah 47 tower dipasang untuk penangkal petir di Cilacap. Demikian juga nanti progres di kilang Balongan ya dan Balikpapan dan kilang lain.

KETUA RAPAT:

Oke, soalnya hari ini Joko Tingkir mereinkarnasi Pak, muncul lagi Joko Tingkir ahli petir tuh. Jadi, banyak lagi soalnya kejadian kilang-kilang Pertamina ini kena petir. Jadi, jangan sampai nah itu mungkin panggil pawang Mandalika aja Pak, saran saya jadi kan bisa untuk menangkap petir.

Ya, ada lagi, Pak?

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Terima kasih, cukup paparan dari kami dari kilang. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bu, yang terakhir. Bu nanti sebelum masuk ke teman-teman anggota itu yang kilang Tuban itu update status terakhir udah berapa persen Bu, soalnya penting ini apa ini terkait dapilnya Bu Ratna yang paling Juwita. Jadi, kalau urusan kilang Tuban ini yang paling berkepentingan ya, saya soalnya kalau udah urusan sama PKB ini takutnya nyerempetnya ke Nasdem Bu. Jadi kita jaga hubungan dengan PKB ini karena dalam rangka menjaga hubungan juga dengan Nasdem.

Silakan Pak, ini aja Pak, persentasenya aja Pak.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Baik, mungkin sekilas saja ya Pak sebelum nanti ada.

Jadi, untuk GRR Tuban saat ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa pekerjaan feed-nya itu sudah mau selesai di bulan Mei, mid of may kita selesai untuk front and engineering definition yang dikerjakan oleh.

KETUA RAPAT:

Feed ya Pak, bukan pre feed.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Feed, kemudian nanti dilanjutkan dengan pekerjaan untuk persiapan *bid package* untuk EPC yang rencananya ada di kuartal 1/2023. Nah, sedangkan yang di lapangan saat ini yang sedang berlangsung adalah untuk pekerjaan *land acquisition, land clearing and early work*. Nah, di mana *land clearing* itu adalah fase 4 yang saat ini sedang berlangsung di lapangan yaitu pembebasan lahan warga atau *land clearing* warga seluas 221 hektar. Di mana progresnya saat ini pekerjaan *land clearing* adalah hampir 50% atau *ahead* daripada rencana 45% yang di lapangan.

KETUA RAPAT:

Jadi, status sekarang masih dalam proses *land clearing* ya.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Betul yang di lapangannya demikian, sedangkan pekerjaan *engineering* sama persiapan untuk lelang APC, Pak.

Demikian, Pak.

KETUA RAPAT:

Pesan saya satu aja Pak, nanti kita akan agendakan khusus terkait Tuban ini, namun Bapak harus banyak-banyak urusan dengan Bu Ratna yang paling juwita ini Pak, ini dapil beliau ini soalnya beliau yang paling berkepentingan. Saya kalau baru nyebut Bu Ratna yang paling juwita pas datang bos Nasdem, jadi pas gitu Pak. Makanya saya bilang itu satu koalisi Pak, koalisi ideologis, ya jadi tolong Pak itu karena ada pesan sponsor tadi dari Bu Ratna GRR Tuban ini harus menjadi prioritas dan perhatian penting karena menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat Tuban di sana, Pak.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin Pimpinan, sedikit, sedikit saja.

Karena ini tadi sudah digarisbawahi sama Pimpinan bahwa ini tidak akan menjelaskan secara detail begitu, saya cuman ini nanya yang *basic* aja Pak. Jadi, kalau di GRR yang ada di Tuban itu, kita jadi atau tidak bekerja sama dengan Rosneft itu aja.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya *it's oke*, itu nanti ini. Saya pikir cukup Bu ya ini dari kita, silakan nanti dari teman-teman kita persilakan.

Dari PDIP, *monggo*.

F-PDIP (PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E.):

Paramita, Pimpinan. Izin, kapoksi.

KETUA RAPAT:

Ya, terserah, saya sih tergantung internal PDIP, kalau tanya ke saya, saya lebih pilih perempuan. *Ladies first*. Itu udah pakai baju pink itu, nggak boleh macam-macam bahaya sama perempuan.

Silakan Mbak Paramita Rusady.

F-PDIP (PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E.):

Paramita Rusady udah tua, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII, dan
Yang saya hormati rekan-rekan anggota Komisi VII, dan
Yang saya hormati Bu Dirut, ini saya perhatikan Bu Dirut ini semakin cantik gitu ya, penampilannya beda gitu, juga
Ada Pak Alfian, Pak Alfian saya lihat ini puasa-puasa, semakin kurus Pak, ini kenapa, puasa apa karena apa? Semoga seluruh jajaran Pertamina semuanya sehat dan terhindar dari virus Covid, ya mudah-mudahan udah nggak ada Covid-covid lagi.

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan harapan saya soal pergantian jajaran direksi hulu yang baru-baru ini dilakukan. Saya harap jajaran baru ini tidak kesulitan dalam mempelajari hubungan antara kilang dan hilir karena karakter pekerja dan budaya kerjanya pasti berbeda begitu. Semoga jajaran Direksi Hulu yang baru ini bisa cepat menyesuaikan diri, apalagi Pertamina ini sedang membangun kilang untuk memproduksi BBM dengan standar Euro 5. Harusnya menyesuaikan ini tidak sulit ya karena dilakukan ada beberapa direksi yang memang memiliki latar belakang pernah bekerja di Hulu.

Yang kedua, saya akan berkomentar soal ketahanan BBM kita. Ini, sejauh ini setidaknya ada 10 kilang yang tengah dikembangkan oleh Pertamina, termasuk kilang baru yang ada di Tuban. Yang saya tanyakan pengembangan kilang-kilang tersebut hanya untuk menambah kapasitas produksi BBM saja, betul ya Bu Dirut ya bukan untuk menambah hari cadangan BBM kita. Se jauh ini cadangan BBM kita ini hanya cukup untuk 19 sampai 23 hari saja, padahal menurut Badan Energi Internasional idealnya cadangan BBM nasional itu harusnya 90 hari. Dibandingkan negara-negara lain, ASEAN saja kita jauh tertinggal, Vietnam cadangannya bisa untuk 47 hari, Singapura 60 hari, Thailand yang sering mengalami kisruh politik saja itu cadangan BBM-nya bisa untuk 81 hari. Harusnya pengembangan kilang-kilang itu juga bisa

menambah hari cadangan BBM kita Bu Dirut, apalagi sekarang strukturnya sudah *holding* dan *subholding*. Ini berarti nanti untuk pendistribusian di hilir Patra Niaga harus beli ke kilang karena tiap *subholding* pasti punya target keuntungan masing-masing. Sementara setahu saya, keuangan Patra Niaga ini sedang berdarah-darah betul nggak ini Pak Alfian? Lalu mau beli pakai apa ini pengamanan cadangan BBM ini di hilir, apakah pakai piutang di pemerintah yang 100 triliun, Pak. Berarti nanti kilang tidak akan terima uang gitu, apakah kilangnya mau tidak terima.

Pertanyaan penting selanjutnya, apakah bisa Patra Niaga ini membeli minyak dari kilang dengan harga yang lebih murah, kalau lebih mahal kan lebih baik impor. Untuk Patra Niaga beli dari kilang milik Pertamina, impor lebih murah jadi lebih baik untuk keuangan Patra Niaga. Kalau begini berarti esensi tujuan pembangunan kilang yakni untuk mengurangi impor tidak mencapai, tidak menjadi tidak tercapai.

Mungkin itu Pimpinan yang bisa saya utarakan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Memang kalau *wong* Brebes itu enak, ngomongnya itu enak, karena berprotein tinggi. Bonuslah buat Pak Gunar.

Silakan Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ramadhan kareem, udah beberapa hari kita Ramadhan ini Pak, udah masuk hari keempat ya, ya *alhamdulillah* masih seger, masih sehat.

Pimpinan yang terhormat,
Kawan-kawan Komisi VII,
Ibu Dirut yang semakin cantik, kita partai pemerintah Pak harus jelas,
Pak Alfian yang semakin ganteng, juga
Bapak Direktur Hulu, Bapak Direktur Kilang, beserta jajaran satu-satu yang nggak bisa disebutin.

Saya hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Mita sebelum saya menyampaikan aspirasi dari daerah pemilihan saya. Jadi, saya mendapat hukuman apa TikTok ya viral ya di *WhatsApp Group* berkaitan dengan

statement-nya Pak Alfian ini, luar biasa Pak Alfian ini, saya kasih apresiasi. Jadi, kadang-kadang Bu Dirut perlu juga dikasih *statement-statement* yang keras ya kan, jadi Pak Alfian ini dapat beritanya kalau ada SPBU yang macet, antri itu segera lapor ke Pertamina ya kan, dicatat nomor SPBU-nya, di mana titik koordinatnya akan segera dikirim. Wah, ini kenceng nih, satu lagi kalau ada yang nimbun segera juga lapor, kita tutup SPBU-nya.

Statement-statement seperti ini di republik kita ini kalau dalam kondisi seperti ini, ini betul betul jadi viral. Artinya apa? Dibutuhkan ketegasan ya kan dari pemerintah, ini domainnya Pertamina ya kan, ini top ini, bagus itu, kita *support*. Kita kasih tahu Pak Alfian, Pak Alfiannya malah bikin waduh katanya, nggak apa-apa Pak Alfian itu udah *top* dan itu saya *share* juga ke grup-grup lain karena ini rapatnya dengan Komisi VI ya bukan Komisi VII. Saya juga menyampaikan seperti itu dalam instagram saya, kalau ada SPBU yang antri atau yang nimbun, catet kasih tahu, kita langsung tindak tegas karena yang kondisi-kondisi seperti ini memang banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan seperti itu. Itu buat Pak Alfian.

Terus juga tadi saya juga baru *negeh* apa yang disampaikan oleh Bung Ramson Direktur Kilang ini baru ganti Bu ya dari Pak Joko sebelumnya, mohon izin Pak namanya siapa, Pak?

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITIYAWARMAN):

Taufik Adityawarman, Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Oh Taufik ya, memang biasa ngurus kilang?.

DIRUT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (TAUFIK ADITIYAWARMAN):

Saya 30 tahun di *upstream* Pak di Hulu dengan Pak Budiman.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Oh iya, ya, ya nanti Pak Ramson kita kunjunganlah ke sana udah diundang sama Pak Budiman ini. Terus yang Hulu, di dapil saya Pak, itu ada penambang liar *illegal drilling* yang produksinya 5.000 sampai dengan 10.000 barel per hari. Tetapi Pertamina tidak melakukan apa-apa dengan adanya *illegal drilling* itu, sudah sering kita sidak, sudah sering kita melaksanakan rapat baik dengan Pak Dirjen Migas, SKK Migas maupun Pertamina unit berapa itu di Prabumulih itu Pak. Kita bersama dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan itu betul-betul menunggu langkah apa selanjutnya setelah rapat itu gitu, sudah disampaikan kepada Menteri ESDM, juga sudah disampaikan kepada Pertamina tembusannya. Tapi sampai hari ini belum ada jadwal yang dibikin sama Pertamina untuk mengundang pemerintah kabupaten gitu loh, ya kan. Bukan hanya bisa meningkatkan produksi 5.000

sampai 10.000 barel tetapi itu pelaksanaan *illegal drilling* itu sendiri mengancam ya kan keselamatan para penambang, juga merusak lingkungan seperti itu. Ini masukan juga.

Jadi, kami minta kepada Bu Dirut ya melalui Bu Dirut ke Pak Direktur Hulu, coba deh diberesin iya kan juga Pak Direktur Kilang di situ ada kilang-kilang darurat bikinan lokal. Itu kalau Bapak pernah kunjungan ke sana betul-betul massif Pak, *illegal drilling* di Sumatera Selatan itu. Kemarin yang ditangkap itu cuma ngoplos iya kan minyak *illegal* sama minyak yang dari Pertamina itu di oplos, itu baru yang oplos yang ditangkap, tapi yang ilegalnya itu nggak ditangkap Pak, begitu. Nah, ini tolong ditindaklanjutilah, mudah-mudahan dengan adanya tindakan kita menyelesaikan *illegal drilling* itu bisa meningkatkan produksi.

Itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih banyak.

Saya bersyukur sekali nih Bang Gunhar angkat lagi isu cerita mengenai *illegal drilling* dan *illegal tapping*, ada tambahan satu lagi *illegal cooking*. Jadi ada 3 tuh *illegal drilling*, *illegal tapping plus illegal cooking* itu kalau *illegal cooking* itu ya *refinery* kecil itu, dia masak. Jadi, dia buat kayak tangki *refinery* kecil aja. Terus kalau *illegal drilling* itu mesin pengebornya cuma pakai motor itu. Nah, *illegal tapping* itu dia nge-tap di pipa minyaknya Pertamina dikarenakan rata-rata Sumatera Selatan, Riau itu *low pressure* kan. Jadi, akhirnya *low pressure, low temperature*, jadi pada saat dia nge-tap resiko nggak terlalu ini.

Nah itu, itu mungkin saya pikir perlu menjadi perhatian khusus Pak Gunhar, saya setuju itu juga perlu di angkat kembali mengenai isu itu karena sempat rame beberapa tahun yang lalu cuman hilang perhatian kita terhadap isu ini. Ya, seperti apa langkah-langkahnya saya pikir seharusnya ada solusi jalan tengahlah kan begitu, atau kalau memang mau ditutup, tutup sekalian. Tapi kalau memang mau di apakan, silakan aja tapi prinsipnya harus ada penanganan Bu Dirut karena lumayan kalau tadi Bang Gunhar mengatakan 5.000 barel ya Bang? Prediksi saya lebih itu karena dulu saja waktu saya, karena kebetulan saya pernah kerja di Musi Banyuasin itu saja, wilayah saya itu satu hari itu bisa kurang lebih 1.000 barel, tempat saya itu. Jadi, saya pikir itu menarik Bu, bagus untuk kita *follow up-i*.

Baik, selanjutnya yang kedua dari Golkar. Oh silakan Pak Bambang Patijaya penguasa PT Timah, oh bukan penguasa Bangka Belitung. Silakan.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Puasa, Pak? Mas Bambang puasa?

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Tadi saya lupa, saya kembali lagi ke kopi. Jadi, tadi *mis*, setelah nyampe saya baru sadar kan balikin lagi.

Baik.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII beserta anggota Komisi VII, Bu Dirut Pertamina, Pak Alfian, kemudian para Direktur Pertamina Hulu, kemudian Pertamina Kilang dan juga Direktur Keuangan.

Saya menyambung apa yang dikatakan Pak Gunhar, ini teknis Pak Alfian menyangkut persoalan *problem* di lapangan tentang penyalur BBM. Saya akan ambil *case*-nya yang ada di Bangka Belitung. Tadi Pak Gunhar menyampaikan kekagumannya terhadap *statement* Bapak yang keras, yang tegas katanya, antara lain jika ada penimbunan ini akan ditindak. Ini jadi satu masalah Pak, kenapa? Karena koordinasinya tidak jelas antara *statement* Bapak dengan aparaturnya di bawah. Saya nanti akan *forward*-kan ke Bapak foto, *screen capture* perintah daripada SR asistennya tentang bahwa agar setiap SPBU itu menyisakan 1,5 sampai 2 ton pertalite dan bio solar pada tangkinya, jangan dihabiskan. Oleh kepolisian ini dianggap penimbunan. Alasan daripada Pertamina adalah biar besok pagi ketika SPBU buka langsung melayani masyarakat, ada stok iya kan karena kan ada, tentu ada waktu antara nanti mobil tangki datang mengantar BBM dengan apa namanya pelayanan kepada masyarakat. Jadi, jangan sampai habis stok di pagi hari. Nah, memang bisa saja di lapangan misalkan ada SPBU yang nakal, tetapi faktanya kasusnya, ini yang saya alami pada teman saya SPBU-nya itu nggak masalah Pak, cuman karena ada stok itu ya dicurigai. Untung karena teman kita, kita bicarakan ke Krimsus dia bisa mengerti itu. Semalam Dirtipidter Mabes Polri ngebel saya menanyakan soal ini juga, saya bilang ada semacam pengaturan daripada apa istilah SR sekarang, dulu namanya SR ya, sekarang namanya apa Pak?

CEO COMMERSIAL & TRADING SUBHOLDING (ALFIAN NASUTION):

SBM sekarang namanya Pak.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Wakilnya ini mengatur biar ada stok aja di tangki karena sebenarnya kalau di total penjualannya tetap sama sebetulnya, kan stok Pak 1.500 pada hari ini masuk lagi 8 ton, terjual 8 ton tetap ada stok sekitar 1.500 sampai 2 ton kurang lebih kan seperti itu. Tapi ini Pak, belum *clear* dengan kepolisian. Nah, makanya semalam Dirtipidter ngebel saya, saya jelaskan seperti ini, dia bisa mengerti. Saya bilang, Bang tolong dijelaskan, disampaikan kepada jajaran di bawah, jangan sampai orang salah tangkap sehingga kemudian para pengusaha SPBU Hiswana Migas di Bangka Belitung ini resah karena ini. Jadi, *statement* Bapak harus *clear* dulu dengan aparaturnya Kepolisian kan seperti itu Pak. Ini fakta yang saya temukan Pak, dan semalam bener Pak, Dirtipidter ngebel saya soal ini, menanyakan masalah ini. Saya jelaskan Beliau seperti itu, apa yang menjadi kebijakannya. Nanti saya kirimkan *screen capture* perintah daripada wakil SR tersebut kepada pengusaha SPBU di dalam Grup Hiswana Migas Bangka Belitung. Itu satu.

Yang kedua, yang ingin saya ingatkan Pak bahwa tipikal tiap daerah untuk persoalan logistik kan beda-beda. Saya pernah komplain berat ketika di beberapa waktu yang lalu di Bali, kan saya pernah menyampaikan agar persoalan logistik ini hati-hati Pak, tiap daerah ini karakternya berbeda-beda. Khusus untuk Bangka Belitung ini daerah kepulauan, saya pikir case ini akan mirip seperti kawan-kawan kita yang ada di timur nanti, yang juga daerah kepulauan. Alasan terjadi kelangkaan BBM di Bangka, di Pulau Bangkanya ketika di bulan Desember 2021 kemarin karena alasannya adalah ombak besar sehingga kemudian kapal tanker yang membawanya mengalami hambatan dan sebagainya. Saya ingin saya sampaikan adalah persoalan cuaca adalah persoalan terprediksi. Kita ada Badan Meteorologi dan sebagainya yang sudah mengeluarkan prediksi ombak besar akan datang kapan.

Yang ingin saya katakan, sistem logistik dan pengawasan daripada Pertamina, ini harus bisa juga mengatasi persoalan-persoalan hambatan cuaca, Pak. Ini kan udah tahun berapa Pak, 2021, 2022 Pak karena kalau hanya alasannya kembali ke masalah cuaca saya nggak terima karena kenapa? Karena ributnya minta ampun gara-gara itu dan ini saya sampaikan di forum ini, nggak apa-apa. Hanya gara-gara ini kawan-kawan dari PDI ya kan SMS kepada Pak Ahok, Pak Ahok cuma mengatakan, *oke* kami akan atasi langsung jadi berita komoditas. Pak Ahok terima kasih sudah menyelesaikan ini, padahal kan yang kerja Bapak walaupun telat kan begitu.

Nah, maksud saya apa pun menjadi komoditas politik sekarang, apalagi di Bangka Belitung Pak, bagi saya ini penting dan memang nanti menjadi perhatian kami ini persoalan BBM ini di Bangka Belitung memang disinyalir juga, BBM solar terutama ini bisa bocor ke sektor pertambangan. Ini perlu kerja keras juga dari kita bagaimana untuk mengatasi ini.

Jadi, dari saya 2 itu poinnya bahwa pertama perlu ada koordinasi lebih lanjut daripada Pertamina, khususnya Patra Niaga kepada pihak kepolisian persoalan teknis bagaimana mendistribusikan ini, jangan sampai kemudian stok yang sudah diperintahkan itu malah dianggap penimbunan, ini satu hal. Yang kedua, tadi persoalan alur logistik Pak tolong diperhatikan, terutama daerah-daerah kepulauan. Kami tidak mau menerima alasan persoalan hambatan cuaca menjadi kendala, seperti itu.

Terima kasih, Pimpinan.
Saya kembalikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih banyak Pak Bambang Pastijaya.

Selanjutnya dari Gerindra, Mr. Bond.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua, rekan-rekan anggota yang terhormat, dan juga Pak Ketua Komisi dan Pimpinan yang lain,
Bu Dirut sama Bapak-bapak Direktur Utama beserta jajaran yang saya hormati.

Terima kasih Pak Ketua, memang Pak Maman ini sesudah ketua, saya lihat makin bijaksana.

Bu Dirut, ini Pertamina sekarang memang menghadapi *problem*, menghadapi dilema. Saya sudah sejak Pak Mardiono menghadapi persoalan-persoalan Pertamina ke Pak Baihaqi, ke Pak Arifi, Pak Arif Sumarno, ke Ibu yang itu yang lincah sampai ke sekarang. Kalau di kilang Pak Arifi dulu saya sayang, makanya saya tahu soal itu, Pak. Kebetulan beliau dulu mendukung calon presiden yang saya dukung juga tahun 2004, jadi saya akrab sama Pak Arifi dulu jadi makanya saya tahu.

Ini memang *problem* ini dari stok BBM dan LPG, ini biasanya kalau lagi ada guncangan ini bisa menjadi pemicu, ini mesti hati-hati Pertamina karena ini jadi dilema. Kalau naik harga LPG 3 kg ini bisa dimainkan, kalau baca majalah ekonomi itu sudah ada tersirat politiknya di situ mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah sekarang ini. Operatornya antara lain yang sangat strategis yaitu Pertamina, di sini ada energi yang langsung digunakan oleh rakyat yaitu BBM dan juga LPG sekarang ini, yang dulu minyak tanah.

Jadi, memang di satu sisi Pertamina menghadapi bahwa kewajiban pemerintah 100 triliun belum dibayar oleh pemerintah, belum tahu juga sekarang kondisi keuangan pemerintah, apakah masih mudah mendapatkan utang dari publik atau tidak. Jadi, di sini harus hati-hati. Memang kalau soal antri di SPBU Pak Dirut Pertamina Niaga itu kalau udah antri memang itu melihat suatu efektivitas suatu apa, suatu kemampuan manajerial itu di lapangan, Pak. Kalau dia masih ada semrawut-semrawut juga berarti ininya yang nggak pas. Jadi harus dibuat sistem kontrolnya apalagi pemasaran beda dengan kilang, nggak terlalu kelihatan masih bisa alasan disambar petir ya kan karena memang itu secara teknik bisa dibuat perhitungannya disambar petir. Tetapi kalau ada antri masyarakat, misalnya untuk mendapatkan BBM di SPBU-SPBU sampai misalnya 3 kilometer atau nanti antri mendapatkan LPG ya itu menjadi suatu *problem*. Itu yang perlu diperhatikan.

Saya juga heran di daerah dapil saya, ada teriak-teriak begini ini, nih coba nih LPG kan sudah susah.

(Pemutaran Audio)

“Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, bagaimana Pak Ramson? Ini dapil Pak Ramson kekurangan gas di Desa..(suara tidak jelas).. kecamatan Subang. Usahakan Pak, tolong Pak”.

Ini nanti kalau terus-terus begini, ini kan repot gitu maksud saya. Jadi itu adalah sejarah sistem kontrolnya, ini karena ini masih LPG kan belum, artinya BBM tadi, soal solar-solar itu sistem kontrolnya harus diperkuat dan posisi Pak Alfian ini sebenarnya sangat rentan terhadap situasi politik. Ini saya kasih tahu saja, masih beda dengan Dirut PT Kilang ini bikin-bikin alasan tehnik mudah nih. Saya tahu persis jadi tidak terlalu rawan, yang rawan yang langsung ke masyarakat. Kalau dari sisi stok ini sebenarnya bagus masih, artinya belum rawan kalau dari sisi stok tapi di lapangannya saya udah baca ini halaman 6 mengenai stok yang ada. Jadi, ini masih wajar tetapi kalau di lapangan terjadi terus-terus begitu, itu akan menjadi repot itu menjadi suatu letupan seperti kemarin misalnya minyak goreng. Itu kan bisa nanti menjadi letupan-letupan itu yang harus memang dikelola oleh operator, operator ya Pertamina. Ini ada lagi apa namanya *subsidiary company*-nya yang menangani, itu aja karena saya kan sekarang bagaimanapun kan partai koalisi. Kalau saya nggak partai koalisi udah lain lagi argumentasi saya Pak, tajamnya udah nggak ketolongan lagi tapi saya kan partai koalisi, harus mengamankan juga. Jadi, sebenarnya masih bagus dari sisi stok, ini pemerintah masih bagus dari sisi stok nih, masih oke nih, ini datanya nih, di TV-TV lihat nih ya kan tapi hanya operasional manajemen di lapangan aja, hanya itu aja yang perlu diperbaiki Pak Dirut PT Parta Niaga. Saya nggak *add tag* Ibu Dirut, ini saya juga bukan *menge-tag* hanya mengingatkan aja, hanya mengingatkan karena posisi itu sensitif terhadap politik, itu cukup sensitif.

Itu aja yang mau saya beritahukan karena di situ saya baca majalah ekonomi saya pikir nih, ini kayaknya udah ada mulai main nih karena banyak faktor seperti tadi geopolitik yang mungkin ada bicara, itu mempengaruhi

terhadap sikap kita di sini akhirnya dilihat. Semua kan harus dari bawah kalau orang bermain, nggak hanya elit kalau udah main di bawah baru jadi opini, jadi berita. Itu yang perlu dicermati Pak Alfian. Ya saya kalau jadi konsultan kan sebenarnya udah bisa tapi saya senang aja di DPR RI ini sebagai anggota pun *oke*, periode depan *Insha Allah* anggota lagi *oke* juga iya kan, syukur-syukur presiden terpilih itu urusan nantilah, iya kan, kita siap aja di *job* apa pun iya nggak Pak Kyai. Ya kalau itu memang sudah dari dulu kita siap dari 2004 pertarungan dengan bosnya Pak Sartono dulu kalau bosnya beliau yang tidak menang, mungkin posisi udah lain waktu iya kan.

Itu aja Pak Ketua. Jadi, Bu Dirut sama Pak Dirut PT Patra Niaga itu diperhatikan betul. Jadi, tegas saja ke menengah ke bawah itu kadang-kadang menengah bawah itu seperti tadi informasi dari Pak Bambang itu suatu persoalan di tengah bawah, harus tegas, jangan lembek-lembek lagi dalam keadaan sekarang ini. Tegas saja kalau nggak bener ganti aja gitu, sikap harus seperti supaya bisa lancar di lapangan karena dari sisi data ini masih *oke*.

Demikian Pak Ketua karena kita hanya memberikan masukan aja, tidak mengkritisi, memberikan masukan supaya lebih mantap.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.
Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Memang luar biasa Mr. Bond.

Tapi, Pak saya sih setuju, memang posisi beliau ini Bapak sebagai sebagai Dirut Patra Niaga karena bersinggungan langsung dengan sosial. Artinya aspek sosial masyarakat terkadang isu di bawah itu sering kali tertarik dalam dimensi politik Pak, jadi harus pandai-pandai dipahami juga Pak. Jadi, saya pikir apa tadi yang menjadi teriakan suasana kebatinan ibu-ibu, emak-emak di tempatnya Mr. Bond itu kan memang yang namanya Mr. Bond itu memiliki daya tarik kepada para wanita. Jadi kayak tadi kan ibu-ibu itu luar biasa gitu Pak waduh, makanya itu perlu diperhatikan Pak. Tapi kalau dari sisi data memang seharusnya *secara volume*, kalau *volume* itu bertambah seharusnya nggak ada masalah kan sebenarnya. Ini tinggal masalah mungkin ada, saya nggak tahu juga kalau nanti silakan aja Pak dijadikan perhatian khususlah di wilayah-wilayah itu.

Selanjutnya apa tadi tuh, oh iya Nasdem. Saya pikir yang alam gaib nunggu dulu sebentar Pak ya, kita prioritaskan yang ada di sini dulu nih. Selanjutnya dari Nasdem, Arkanata. Wah, ini pantesan Pak Sugeng ini awet muda terus, sekarang saya lihat rambutnya udah enggak ada uban karena diapit oleh dua para anak-anak muda.

Silakan Pak Arkanata.

F-P.NASDEM (ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (Hons) MEng.Sc.):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VII beserta rekan-rekan anggota Komisi VII,
Yang terhormat Dirut Pertamina serta jajarannya.

Mungkin saya disini hanya memberikan penekanan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, terutama tadi karena dapil saya juga Dapil 3T. Dapil saya juga dapil yang jumlahnya sedikit dan saya kira juga tidak pernah bosan saya sampaikan bahwa daerah seperti Kaltara itu Kalimantan Utara itu populasinya sedikit. Dan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya mungkin ketika melihat di *slide* 6 dan melihat *overview* kondisi stok BBM dan LPG sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirut Patra Niaga tadi, kita aman terlihatnya. Tetapi apakah keamanan tersebut sesuai dengan distribusi yang merata ke seluruh Indonesia, apakah kita selalu hanya melihat *big number* saja. Saya kira tidak bisa begitu ketika kita berbicara mengenai hajat hidup manusia yang ada di Indonesia ini karena setiap individu manusia itu memiliki kepentingan. Setiap individu manusia memiliki hak untuk menjalankan apa yang mereka percaya, dalam hal ini dalam Ramadhan dan juga dalam Idul Fitri ketika mereka pulang kampung akan sangat sulit sekali karena dapil saya mirip juga dengan dapilnya Pak Bambang. Bedanya mungkin ada yang lewat darat, ada juga yang lewat laut dan yang lewat darat ini kan lebih sulit lagi, ada mereka yang kerjanya di Bulungan atau kuliahnya di Bulungan masyarakat di Kaltara itu. Kemudian ketika mereka pulang kampung harus ke Malinau atau ke Nunukan, jaraknya bisa sampai 5 sampai 7 jam, ini kan jarak yang sangat jauh sekali. Apakah Pertamina sudah sampai ke sana ketika di sini diperlihatkan di *slide* nomor 10 tadi, kunjungan manajemen Pertamina ke regional.

Di sini saya tanya, Pertamina apakah kalian sudah sempat sampai ke perbatasan Indonesia? Apakah sudah pernah sampai ke Pulau Sebatik? Apakah sudah pernah sampai ke perbatasan di daerah Nunukan sana. Jangan sampai nanti sebagaimana yang saya sampaikan selalu terulang-ulang dan terulang-ulang bahwa mereka nanti beli bensinnya pada ujung-ujungnya ke Petronas, udah nggak ke Pertamina lagi karena Pertamina tidak bisa menyiapkannya dan juga tidak ada harga yang istilahnya bisa memadai untuk mereka.

Dan dalam hal itu mungkin itu bentuknya himbauan dan juga saya juga memita kepada rekan-rekan Pertamina agar yang ada di *slide* halaman 6 itu walaupun secara angka besar dibidang aman, tapi saya meminta data yang membuktikan bahwa itu beneran aman. Dalam artian data ketahanan stok nasional per regional, per daerah yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya angka-angka besar ini saja yang mewakili suatu negara, tetapi setiap daerah yang ada di Indonesia, ini perlu ada pendetailannya.

Mungkin itu dari saya, Pimpinan.

Terima kasih atas waktunya.

Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya tambahkan Bu Dirut dan Pak Alfian memang kasihan Pak daerah-daerah kayak yang Kaltara, secara populasi penduduk kan memang kecil ya, terus luas letak geografis besar. Terkadang kalau dari segi ekonomian misalnya kalau kita mau bicara distribusi seringkali kan bermasalah gitu kan, karena secara keekonomian kan *cost* tinggi pada saat pendistribusian itu. Itu memang tolong betul-betul. Jadi, saya pikir kurang lebih isunya sama kalau di wilayah Kalimantan ini, tapi memang yang paling kasian, paling *suffer* itu ya Kaltara karena 1 provinsi dia cuma 600 ribu nggak sampai 1 juta dia penduduknya, tapi luas wilayahnya luar biasa besar sekali. Jadi, ya ini juga salah satu isu yang memang perlu menjadi perhatian Pertamina.

Selanjutnya, dari PKB, silakan, *monggo* Mbak Ratna yang paling Juwita sekali.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak Ketua, Pimpinan serta seluruh sahabat-sahabat Komisi VII,

Yang kami banggakan Ibu Dirut Holding beserta para dirut dan jajaran yang mendampingi pada hari ini.

Terima kasih atas paparannya dan sebelum semuanya ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Pertamina, yang beliau-beliau ini juga menjadi kunci sukses atas pergelaran MotoGP Mandalika kemarin, tepuk tangan dulu buat Pertamina. Itu tetap apresiasi harus terus kita berikan karena kita juga sama-sama menunggu piutangnya negara ke Pertamina ini kapan diselesaikan begitu, supaya kita juga bisa menjalankan fungsi pengawasan ini dengan *balance*.

Sebelumnya saya ingin mengingatkan saja Ibu Dirut beserta para direktur yang lain. Saya ingin membacakan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Ada 4 variabel penting yang bisa kita gunakan untuk menghitung indeks ketahanan energi nasional yang pertama *availability*, yang kedua *overability*, yang ketiga *accessibility* dan yang terakhir *acceptability*. Yang sebelum pandemic Covid-19

di tahun 2019 itu kita ada di angka 6,57, jadi hanya di posisi tahan, itu sebelum pandemi Covid, Pimpinan, sekarang pasti di bawah itu.

Jadi, terkait bagaimana akhirnya Pertamina kemarin menaikkan harga pertamax meskipun ini BBM nonsubsidi ya pasti membawa implikasi lain karena pertamax naik, yang biasanya mengkonsumsi pertamax, dia mencari produk yang lain. Karena semakin banyak yang membutuhkan akhirnya terjadilah kelangkaan BBM di berbagai daerah.

Saya ini agak, jujur agak terganggu begitu ya dengan pemaparan yang di halaman 3, boleh izin ditampilkan halaman 3. Di sini di poin 6, saya mengapresiasi terkait bagaimana persiapan-persiapan *overview*.

KETUA RAPAT:

Sebentar Mbak, ditampilin halaman 3 biar sama-sama lihat. Bisa tampilin Mas, yang halaman 3 presentasinya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Halaman 3 ya *oke*, di sini kita diberikan *overview* persiapan Satgas Rafi tahun 2022. Saya mengapresiasi poin-poin yang disampaikan, ini saya anggap sebagai bentuk ikhtiar dari Pertamina Patra Niaga dalam hal ini untuk menjamin ketersediaan, baik itu pasokan maupun distribusi untuk masyarakat seluruh Indonesia, seluruh Indonesia ya termasuk 3T tadi tempatnya saudara kita. Cuma tolonglah yang di poin 6 saya baca ya, seluruh Direksi Holding, Subholding telah turun ke lapangan untuk memantau kondisi penyaluran BBM di SPBU. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan stok SPBU dalam kondisi aman, antrian di SPBU relatif normal walaupun ada beberapa antrian di SPBU yang didominasi oleh truk *overdimension overload*.

Pak, yakin Pak, apa perlu kami ngirim foto-foto antrian yang ada di semua daerah kami dan itu bukan hanya truk yang Bapak bilang *overdimension overload* lho Pak. Kalau misalnya Bapak menyampaikan semacam ini Bapak sudah koordinasi belum dengan Kementerian Perhubungan, dengan aparat keamanan? Kami khawatir baru saja ada berita di Mandailing Natal itu karena mereka antri Pak, ada salah satu L300 itu yang memuat orang mau melahirkan, orang mau melahirkan. Tapi karena memang antrinya itu luar biasa, terjadinya pada malam hari, dia itu ditabrak Pak dari belakang sampai akhirnya orang ini meninggal. Ini artinya apa? Masyarakat secara umum mereka semuanya juga ngantri, gitu loh Pak. Jadi, kalau misalnya Bapak cuma mengarisbawahi yang truk ini, saya rasa Bapak terlalu mengkambinghitamkan. Kasihan Pak, jangan. Harusnya saat Bapak sudah menyatakan sudah turun ke bawah, sudah dilihat bahwa semua ini kondisinya sudah aman, ya sudah *stop* di situ, nggak usah mencari perkecualian semacam ini. Ini sangat sensitif kalau menurut kami. Yang pertama itu.

Yang berikutnya, saya harap kelangkaan-kelangkaan ini tidak lagi-lagi dibebankan terhadap bagaimana masyarakat kita yang mulai merangkak naik kegiatan perekonomiannya, jangan. Saya harap Bu Dirut, Pertamina sudah

memiliki *roadmap plan* yang jauh lebih futuristik gitu lah. Harusnya kan sudah bisa memprediksi “oh bulan sekian Covid sudah mulai mereda, semuanya sudah bisa melaksanakan kegiatan ekonominya dengan cenderung normal, berarti kebutuhan akan meningkat sekian persen”. Nah, ini kan harusnya sudah bisa dianalisa dari awal, dan mitigasinya seperti apa.

Yang berikutnya, terkait komitmen *subholding upstream*. Saya membaca, tadi ada salah satu komitmennya adalah *green commitment*. Ini bagus untuk kita, apalagi dalam menyambut perhelatan G20 November nanti. Dan ini searah dengan target pemerintah, di mana tahun 2030 nanti sudah ada target untuk mengurangi emisi sampai dengan 140 juta ton karbondioksida ekuivalen. Nah, saya agak tertarik karena komitmen ada, target ada. Lah, kira-kira proses untuk mencapai target dalam mewujudkan komitmen ini seperti apa? Itu mungkin nanti bisa dijelaskan kepada kami karena tadi kesepakatan Pimpinan, saya tidak diperkenankan untuk bertanya lebih lanjut terkait GRR yang ada di Tuban. Dalam kesempatan ini, mungkin saya tetap berharap mewakili masyarakat yang ada di dapil. Semoga perjalanan dari proyek strategis nasional ini bisa sesuai dengan target, karena itu sudah mengorbankan kampung halaman dan mata pencaharian sekian banyak kepala keluarga yang ada di Kabupaten Tuban.

Mungkin itu Pimpinan dari kami.

Mohon maaf apabila kurang berkenan. Kami akhiri.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Thoriq.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya pikir tadi ada mengenai isu apa, antrian Pak. Itu di, saya pikir hampir di semua daerah itu Pak, dan kemarin juga ada banyak beberapa pertanyaan ke saya juga melalui SMS dan WA terkait solar gitu ya, kenapa tiba-tiba langka. Padahal sebetulnya kalau *stock volume* kan enggak berkurang gitu loh. Terus, antrian panjang dan lain sebagainya. Saya pikir itu hampir sama itu Pak di semua daerah, dan bukan hanya di Tuban. Di tempat saya, di Kalimantan Barat itu juga begitu. Saya pikir di dapilnya Pak Sugeng, saya rasa di semua juga kejadiannya sama. Jadi saya rasa itu juga harus menjadi catatan loh Pak. Kok bisa seperti itu? Padahal, *volume* kalau kita lihat dari data kan nggak ada yang, malah naik, gitu. Kok, ada apa gitu loh. Nah, bisa aja mungkin panik publik karena dengar mau ada kenaikan harga BBM, akhirnya wah jadi berspekulasi dan lain sebagainya.

Jadi, yang kaya gitu-gitu kan, makanya memang *statement-statement*, makanya dari dulu itu Pak, dari zaman Pak SBY itu. Saya pikir, kalau sudah cerita masalah *statement* kenaikan harga BBM itu, itu harus dikontrol betul itu, harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan tafsir-tafsir publik yang akhirnya berdampak kepada kondisi sosial masyarakat di bawah. Saya pikir itu.

Lalu selanjutnya, oh iya dari Demokrat, Mr. Sartono. Nih Bu, Ibu harus kasih selamat dulu bu buat klub volinya beliau ini juara satu, Bu. Liga voli nasional LavAni.

F-PD (SARTONO HUTOMO):

Kita bertanding dengan Pertamina.

KETUA RAPAT :

Oh, jadi *competitor* ya. Baru tadi saya mau.

F-PD (SARTONO HUTOMO):

Tidak ada sponsor ya Pertamina.

KETUA RAPAT :

Baru tadi saya mau bilang, itu Pertamina nggak ada niat mau ngasih sponsor? Juara satu, nggak bercanda.

Silakan Pak Sartono.

F-PD (SARTONO HUTOMO):

Terima kasih.

Pimpinan Komisi VII yang kami hormati,
Para sahabat Komisi VII yang kami hormati, baik yang di dunia nyata dan di alam *ghaib*, dan
Ibu Dirut yang kami hormati,
Pak Afian,
Ibu Direktur Keuangan,
Direktur Hulu Energi, dan
Direktur Utama Kilang,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa, atas nikmat, rahmat, yang tak terhingga, sehingga kita bisa bertemu dalam forum yang penuh berkah ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik.

Saya hanya ingin menanyakan saja Ibu Dirut, hasil daripada rapat beberapa saat yang lalu dengan Komisi VII. Apakah pemerintah ini sudah mencicil begitu hutang yang 100 triliun itu? Nah, ini kan harus menjadi apa, *concern* kita begitu, Komisi VII DPR RI. Kalau hutang itu belum terbayar, nah itu kan juga *ndak* bisa bergerak itu Pertamina itu. Jadi, sudah diberikan

penugasan ya kan, disuruh cari uang sendiri, disuruh hutang begitu, bahkan harusnya kalau dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas gitu atau BUMN, ini kan harus juga diberikan *space* untuk dapat untung, begitu. Kalau tidak, itu menyalahi undang-undang. Nah, yang disalahkan siapa ini? Pertamina atau yang memberikan tugas?

Nah, ini tidak *fair* kalau Pertamina juga kita biarkan begitu, apa, rugi. Kita juga harus memberikan apa, mendesak begitu, agar hutang itu cepat dibayar itu. Kalau saya baca datanya, mulai 2017, 2018, 2019 ya, sampai sekarang itu sampai menumpuk 100 triliun. Nah, ini apa, salah satunya kalau kita juga ingin tugas-tugas itu berjalan dengan baik, harus kita apa, kita sampaikan itu agar hutang itu dibayar kepada pemerintah. Itu yang apa, pertama.

Jadi itu Bu. Itu apa, yang juga menjadi ganjalan itu ya. Badan Usaha Milik Negara tapi dipaksa untuk rugi itu ya, diberikan tugas begitu. Saya yakin dari pihak Pertamina kan *ndak* berani begitu Bu ya. Kami, saya sampaikanlah itu. Karena saya juga melihat berapa saat yang lalu, waktu saya juga dulu di Komisi VI, kurang lebih hampir sama juga apa, bahwa terjadi permasalahan itu. Bahkan kalau *ndak* salah, dalam neraca itu diletakkan di paling bawah itu. Ini juga sangat apa, serius begitu terhadap keberlanjutan daripada perusahaan BUMN ini, perusahaan kita bersamalah dalam kasus ini. Itu yang pertama.

Yang kedua Bu, kapan itu kan ada *statement* tuh dari menteri, begitu, tentang akan ada penyesuaian harga gitu. Tapi kalau pertamax kan sudah dinaikkan tuh. Dari apa, sekarang jadi 12.500 ya per liter ya. Yang juga menjadi pertanyaan, ini kan tadi juga sudah disampaikan Ibu Ratna tentang kelangkaan-kelangkaan pertalite itu. Ini juga di beberapa daerah, antrean-antrean, di Tiktok begitu, di-*share* WA, luar biasa tentang apa, antrean-antrean kebutuhan daripada pertalite, solar, dan sebagainya.

Kami tahu, mungkin apa, kuota daripada subsidi ini terbatas gitu, dan itu juga harus ada keputusan politik juga dari pemerintah, dan juga harus dibahas dengan DPR. Jangan sampai dalam menghadapi apa, puasa ini ya, *Ramadhan* ini, dan juga nanti lebaran, akan terjadi apa, permasalahan yang luar biasa dampak daripada apa, ketidakterediaan daripada bahan bakar ini. Ini yang apa, yang kedua.

Ketiga, kira-kira bu, pertalite ini akan dinaikkan tidak ini bu? Gitu kan. Realitasnya begitu ya. Dengan apa, dengan harga dunia naik begitu, apakah ada rencana? Tetapi dengan *statement* menteri itu terjadi gejolak juga, makanya terjadi kelangkaan ..(*suara tidak jelas*).. itu.

Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Iya, memang tadi kita juga sempat diskusi, Bu. Ini kayak, ini kan kayak di lingkaran setan, ada istilah kita tuh kayak di lingkaran setan. Semua tuh sudah *teu pararuguh* kalau Orang Sunda bilang itu. Ini saya orang Kalimantan mencoba ngomong. Ya nyoba-nyoba Pak, nama saya sudah nama Sunda, masa *nggak* boleh, Pak. *Teu pararuguh* kalau kata Orang Sunda itu bilang.

F-PD (SARTONO HUTOMO):

Diperbolehkan bahasa daerah ya Pak?

KETUA RAPAT :

Nggak *geunah* gitu. Jadi, sudah saling *nggak* jelas, kusut, benang kusut. Jadi, sekarang kayak problematika subsidi ini kan sekarang sebetulnya harapannya kan kita mau membantu rakyat, tapi mengorbankan kanan-kiri jadinya, kantong kanan, kantong kiri dua-duanya. Sejatinya sebetulnya yang namanya subsidi itu seharusnya ditanggung penuh oleh APBN. Namun, kan fakta hari ini kan Pertamina ikut menanggung beban subsidi tersebut yang akhirnya berimplikasi terhadap aksi korporasi Pertamina.

Tapi, saya rasa nanti kita akan agendakan khusus itu Bu, dan saya rasa, ya Pimpinan ya? Jadi, saya rasa terkait mengenai isu apa, subsidi, beban subsidi energi Pertamina ini perlu kita agendakan khusus pada rapat khusus yang nanti perlu menghasilkan sebuah kesimpulan rapat, rekomendasi Komisi VII terhadap situasi ini. Artinya maksudnya jangan sampai kita udah kena beban subsidi yang besar, ditanggung APBN, tapi kena dampak lagi secara korporasi dari Pertamina itu. Jadi, perlu ada sebuah jalan tengahlah, solusi jalan tengah untuk menyelesaikan beban ini. Di satu sisi pemerintah kena beban untuk subsidi, namun di sisi lain Pertamina secara perusahaan, secara korporasi juga kena beban juga. Jadi, 2 kali beban kita. Jadi, kalau bisa satu kali saja bebannya, jadi ini jangan keganggu gitu.

Jadi, saya pikir itu nanti Mas Sartono, mana Mas Sartononya? Sudah jalan? Oh iya. Jadi, saya pikir itu nanti Bu yang, saya hanya menambahkan saja tadi terkait itu.

Selanjutnya, iya selanjutnya dari, saya pikir kasih dulu partai yang lain dulu mas ya, jadi biar kita *rolling* dulu. Pak Mul, ini ada dua anggota dari PKS yang mau memberikan tanggapan, iya. Sebetulnya bukan masalah darat dan dan alam *gahib*, yang ini perempuan Pak Mul, jadi saya agak, jadi saya itu, saya lebih prioritas yang wanita. Iya Pak Mul ya? Izin ya Pak Mul ya?

Silakan Bu, silakan Bu.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Bu, sebentar Bu, saya minta izin kita tambahkan 30 menit ya? Ya.

(RAPAT : SETUJU)

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi VII, Ibu Dirut Holding dan seluruh dirut beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan ini.

Saya Diah Nurwitasari, Fraksi PKS, daerah pemilihan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan ini tentu saya menyampaikan selamat menjalankan Ibadah Ramadhan. Mudah-mudahan kita semua meskipun menjalankan tugas, kita niatkan dengan niat ibadah, sehingga pahalanya juga berlipat ganda, terlebih lagi ketika kita berusaha untuk semakin banyak menebar kemanfaatan, memudahkan urusan orang lain, *Insyallah*, Allah akan memudahkan juga urusan kita di akhirat nanti, *Insyallah*.

Bu Dirut, saya ingin menyampaikan sebagai wakil rakyat Bu, ya. Kalau tadi pakar-pakar migas di sini sudah sangat banyak, teman-teman Komisi VII, saya ingin berbicara sebagai wakil rakyat Bu, dan saya ingin menyampaikan hasil pantauan dan suara rakyat.

Hasil pantauan tidak lagi lewat WA dan tidak lagi lewat apapun yang masuk ke dalam *broadcast* ke dalam apa, media komunikasi saya tapi beberapa hari ini juga saya langsung turun di lapangan dan melihat secara langsung. Saya kunjungi SPBU, saya kunjungi pasar, saya tanya masyarakat langsung, apa dampak dari kenaikan misalnya harga pertamax. Yang terjadi jelas itu, memang antrian di pertalite banyak, dan saya pilih sejumlah motor yang bagus-bagus Bu, yang biasanya tentunya biasanya konsumsinya pertamax itu. Dan kemudian saya tanya, "Kenapa sekarang antri di pertalite?", "Nggak kebeli pertamax", itu. Jadi, terjadi perpindahan dari pengguna yang biasanya menggunakan pertamax, sekarang pindah ke pertalite. Ini satu fakta.

Kemudian yang berikutnya tentang solar. Dikatakan di mana-mana solar tidak langka, tidak langka, kenyataannya tadi sudah disebutkan di berbagai daerah Pak, tetap saja antri. Saya bertemu dengan seorang, bukan seorang, sejumlah sopir ya yang rata-rata dari apa namanya, ya UMKM, industri, truk, mau ukurannya kecil, ukurannya besar, gitu ya. Dan ketika saya ajak ngobrol, "Iya bu, saya barusan jalan, sepanjang jalan dari sekian kecamatan tidak ditemukan, sejumlah SPBU kosong solar, baru ditemukan di Jalan Raya Rancaekek yang itu adalah jalur nasional" gitu. Dan dia bercerita, di hari sebelumnya, sepanjang SPBU, sepanjang Bandung sampai Sumedang, itu juga dia kehabisan solar, kosong itu, seperti itu. Jadi, ini memang persoalan yang nggak bisa dikatakan dengan dijawab "Enggak kok, nggak langka". Ya

masyarakat kan melihat apa yang ada di lapangan, masyarakat tidak sekedar cukup mendapatkan jawaban ataupun keterangan dari para pejabat gitu, tapi mereka lihat “pokoknya kita susah” gitu.

Nah kemudian, dengan langkanya solar, ini bukan hanya kesulitan bagi para pengemudi dan para pemilik truk, di pasar pun akhirnya para pedagang juga mengeluhkan. Solar menjadi sulit, biaya transportasi menjadi lebih mahal, bahkan waktu tempuh ataupun suplai barang ke pasar juga jadi lebih sulit, akhirnya harga di pasar juga jadi naik, gitu. Pedagang itu juga jadi naik.

Saya sengaja berkeliling-keliling di pasar tradisional, bertemu dengan masyarakat yang mau beli daging, betul-betul terpana. Dia bawa uang apa adanya, terus kemudian beli daging, ternyata harga daging naiknya sudah luar biasa sekali, akhirnya dia cuma bisa beli seperempat kilo. Saya tanya, “Kenapa beli cuma seperempat?”, “Ya uangnya nggak cukup, cuma segini”. Terus saya tanya lagi, “Emang biasanya berapa harga daging?”, kata dia nggak pernah beli daging, ini karena ekstra menghadapi satu Ramadhan, dia memaksakan beli daging, gitu, tapi uangnya ya terbatas begitu, gitu.

Nah, artinya ini, dampak dari kenaikan demi kenaikan ataupun kelangkaan itu betul-betul, ya kalau tadi bahasa Pak Maman *teu pararuguh* bukan *teu pararuguh*, nggak jelas gitu ya, seperti nggak, udah kayak benang kusut seperti itu, tapi betul-betul membuat rakyat itu menderita. Hanya persoalannya, sebesar apapun penderitaan itu, atau seberat apa, pun kenaikan harga itu, masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali tetap membeli BBM itu. Masyarakat tidak punya pilihan lain dan tidak bisa membuat mereka kemudian jadi tidak bepergian, tidak membuat mereka jadi tidak berdagang, membuat mereka tidak jadi belanja, nggak bisa. Semua dampak-dampak itu akhirnya ditelan oleh masyarakat dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Ini yang terjadi di, lapangan.

Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sartono, bahwa Pertamina memang di sini sebagai BUMN ya, artinya betul ya, harusnya kan kita tadinya ada rencana Raker dengan Menteri ESDM ya, tapi itu ditunda, terkait mungkin nanti dengan subsidi maupun juga dengan penetapan harga. Tapi, kenyataan lapangan ini memang harus kita sama-sama dengar, harus sama-sama kita perhatikan.

Yang selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian, tadi pagi saya diundang Elshinta, berbicara tentang wacana kenaikan harga LPJ yang 3 kilogram yang katanya sudah diwacanakan oleh pemerintah. Saya terus terang tidak bisa membayangkan. Jika kemarin kenaikan harga pertamax, kelangkaan solar, kenaikan harga minyak goreng, sudah jadi kado pahit menghadapi Ramadhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau ini jadi kado yang entah pahit pangkat ke berapa kalau sampai gas LPG 3 kilogram yang subsidi ini juga naik. Saya tidak mau jadi kejutan di bulan Ramadhan atau menghadapi Idul Fitri.

Nah, ini saya butuh kejelasan. Apakah benar bahwa tabung gas 3 kilogram yang sekarang subsidi itu akan dinaikkan harganya? Karena ini masyarakat sudah bukan lagi menjerit Pak, kadang-kadang sudah putus asa.

Apalagi nih sekarang yang mau dinaikkan harganya? Apakah tidak ada cara lain? Di tengah kenaikan harga migas, nggak bisa terus-terusan menyalahkan perang Rusia dan Ukraina. Masyarakat itu sudah menjerit di mana-mana. Mereka sudah betul-betul, sampai di radio itu dari pemirsa itu teriak-teriak semua gitu. Kita ini mau dinaikkan apa lagi? Mau sampai batas mana pemerintah membiarkan masyarakat kesulitan, ditengah sekarang.

Dan kita sama-sama tahu, pengguna LPG 3 kilogram ini yang disubsidi, itu kalau saya tidak salah datanya sekitar 93% dari pengguna LPG. Bayangkan 93% masyarakat yang menggunakan LPG hari ini, kemudian naik harganya. Ini dampak pasti luar biasa, dan pasti sangat menyakitkan untuk masyarakat.

Artinya ini menantang kita semua Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana bersama dengan pemerintah itu harus memberikan sebuah solusi yang cerdas dan pemerintah, mungkin nanti ini Pimpinan bisa disampaikan ke Kementerian ESDM. Kalau untuk pandemi bisa *refocusing*, mengapa menghadapi kenaikan-kenaikan seperti ini kita juga tidak bisa *refocusing* anggaran? Agar jelas bahwa anggaran itu diberikan keberpihakkannya kepada masyarakat. Kasihan rakyat kita Pak semuanya.

Dan mungkin sebagai penutup, kalau Ibu dan Bapak dari Direksi Pertamina berkenan, Ibu dan Bapak silakan *follow* akun media sosial kami, Pak. Ibu dan Bapak akan melihat di akun media sosial kami, bagaimana kami turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, apa keluhan mereka, terutama yang terkait dengan bidang energi dan apa, mineral, migas dan lain-lain di komisi ini, sehingga Ibu dan Bapak bisa mengetahui yang *real* di lapangannya itu seperti apa. Tidak hanya sekedar mendapatkan laporan dari karyawan ataupun dari jejaring yang Ibu/Bapak miliki.

Terima kasih.

Saya berdoa kepada Allah, Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada bangsa ini, agar keluar dari segala krisisnya, dan semoga juga Direksi Pertamina diberikan kekuatan dan kecerahan pikiran dalam memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat.

*Billahi Taufik Wal Hidayah,
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Mul, itu sudah tuntas, lengkap, paripurna itu Pak Mul. Jadi, saya pikir sudah selesai barang itu, sudah satu paket itu disampaikan oleh beliau.

Terima kasih banyak Bu dan teman-teman semua rekan-rekan Komisi VII atas paparan dan dialog, maupun tanggapan. Masih kita buka satu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, iya, iya, iya. Iya sebentar. Oh iya, ini PAN belum, oh ya Bu mohon maaf Bu. Mohon maaf. Jadi, ini lbunya kita-kita ini, jadi mamaknya kita-kita ini. Jadi, mohon maaf saya nggak lihat tadi Bu, soalnya.

Silakan Bu Andi Yuliani Paris.

Nanti setelah Bu Andi, kita kasih kesempatan dua kali, dua anggota, habis itu kita lempar ke Pertamina ya, saya pikir itu ya. Setuju ya? Setuju.

Pak Mul, cukuplah Pak Mul ya? Diwakili oleh beliau. Tadi sudah sempurna sekali itu. Terakhir pesan sponsornya sudah masuk, lihat akun instagram Partai Keadilan Sejahtera.

Silakan Bu Andi, *monggo, monggo* Bu Andi.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Yang saya hormati Bu Nicke dan seluruh jajarannya yang tentunya pasti agak pusing akhir-akhir ini dengan kenaikan pertamax ya.

Saya saja sebagai anggota DPR kaget juga “Hah? Naiknya 3.000?” terus kata supir saya, “Kalau mobil ini *full* harus sekian yang harus kita keluarkan”. Waduh lumayan juga ya.

Oke.

Bu Nicke, di sini disebutkan bahwa telah siaga untuk stok BBM dan LPG ini telah disiagakan di 115 terminal BBM, 23 terminal LPG dan seterusnya. Kelihatannya Pertamina ini memang tidak ada masalah walaupun kita lihat antrian berjam-jam, sampai 5 jam, 6 jam ya, terutama di beberapa dapil ya, termasuk di Sulawesi Selatan. Nah, hanya yang ingin saya sampaikan pertama, kita tidak bisa membuat suatu kesimpulan terlalu general. Indonesia ini kan punya kondisi geografis yang berbeda-beda. Jadi, datanya harus detail. Misalnya, di terminal BBM, wilayah mana? Bagaimana kondisinya? Nanti saya minta tertulis, Bu. Di terminal wilayah B bagaimana kondisinya? Itu untuk BBM. Kemudian untuk LPG seperti apa ya? Kemudian, karena ini tergantung juga dengan kondisi perekonomian masyarakat, karakter masyarakat, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi. Apalagi tadi disebutkan 29 hari stok BBM kita. Kalau tiba-tiba ada perang, waduh negara ini *stuck*. Jadi, saya minta yang detail.

Kenapa saya minta detail Bu? Saya kalau ke dapil pakai mobil saya yang dex, itu saya sering, seluruh SPBU di dapil saya, mulai dari Kabupaten Wajo, Soppeng, Bone, Parepare, Pangkep, kosong semua dex. Dan anehnya, ketika saya telepon ke Jakarta, ke salah satu waktu itu saya lupa namanya Pertamina,

saya dibawakan dex ke hotel Bu, ke tempat saya menginap di Kabupaten Wajo, kan lucu. Kemudian ketika saya dari Kabupaten Wajo ke Kabupaten Sinjai, saya harus janji dengan, nanti di perbatasan Bone, Sinjai ada SPBU nomor sekian, di sana ada dex, sudah disiapkan. Lah tapi kan lucu dan anehnya lagi, “Oh iya? Kenapa nggak bilang Ibu Anggota DPR?”, saya bilang “Saya nggak mau harus bilang, saya hanya mau pantau bahwa ternyata permainan di Pertamina itu luar biasa Bu SPBU-SPBU”.

Nah, pertanyaan saya, saya minta *call center* ketika nanti kami merasakan atau kami mendapatkan pengaduan terkait kelangkaan LPG, kelangkaan solar, kelangkaan pertalite, pertamax, di mana kami harus mengandu? Ya. Karena pasti masyarakat mengadu kepada kami ini anggota DPR dan saya sendiri mengalami. Jadi, dex itu dibawakan saya ke hotel, karena seluruh di Kabupaten Wajo, dex, beberapa SPBU dex kosong. Ketika saya juga mau pindah, tadi saya sudah jelaskan, saya harus telepon ke Jakarta, kalau *nggak* saya nggak bisa pulang ke Makassar. Itu terjadi dan itu bukan hanya 1-2 kali Bu, setiap saya ke dapil, saya mengalami itu ya.

Kemudian soal hutang negara 100 juta ke Pertamina. Kira-kira Bu Nicke ini perlu dukungan apa sih dari kami untuk bagaimana? Apa kami harus jadi *debt collector* atau gimana? Enggak, dalam arti kata yang manisnya Bu ya, dukungan politik seperti apa Bu? Karena kami juga tahu kalau Pertamina tidak dibantu seperti ini, kasihan Pertamina bisa *collapse*. Padahal, ini kan BUMN yang harus kita pertahankan, kita selamatkan ya.

Nah, kemudian lokasi-lokasi yang menjadi perhatian utama dalam Satgas ini, *alhamdulillah* sudah dipetakan. Tetapi kalau hanya dipetakan seperti ini nanti akan jadi masalah juga. Jadi, tolong detail Bu. Jadi, *details* misalnya kira-kira bisa dengan Kementerian Perhubungan, berapa sih jumlah kendaraan, jumlah bus, jumlah truk yang ada di situ. Jadi, kita bisa mengantisipasi berapa kebutuhan untuk kerja sama nanti dengan BPH Migas.

Kemudian avtur, saya lihat nggak masalah ya bu ya. Jangan sampai avtur juga nanti masalah, akhirnya penerbangan, sekarang kan penerbangan sudah mulai lancar nih, ini juga diantisipasi, sehingga tidak ada masalah terkait avtur.

Kemudian di halaman 9 tentang transaksi *cashless*. Ini perlu didorong segera, karena dengan mengurangi mobil-mobil yang dimodifikasi kemudian mengisi bahan bakar, kalau transaksinya *cashless*, ini akan terjadi, tidak akan terjadi lagi ya. Terjadi pengurangan maksud saya. Nah, ini harus didorong, tapi jangan kami nanti rapat lagi dengan Pertamina, ini lagi. Tapi saya ingin ada *time frame*-nya ya. Misalnya, untuk program ini atau upaya optimalisasi digital ini kapan selesai 100% atau per wilayah berapa persen yang sudah terealisasi. Misalnya, wilayah kabupaten atau provinsi ini berapa persen, provinsi ini berapa persen ya. Jadi, kita bekerja berdasarkan *benchmark* yang jelas.

Kemudian saya juga ingin menyampaikan yang *subholding* tentang ini juga nanti ya akan detail lagi Pak Ketua. Cuman, yang di sini adalah, di sini disebutkan adanya dukungan yang diharapkan untuk halaman 21,

perpanjangan periode untuk kredit pajak dari 6 tahun menjadi 10 tahun, serta pembebasan pajak. Nah, ini tentunya banyak yang diminta oleh Pertamina ada dukungan. Tetapi paling bagus Bu, kalau dukungan itu apa yang harus, karena Pertamina ini kan mitra kerja Komisi VII dan Komisi VI, apa yang menjadikan peran kami di Komisi VII untuk membantu dukungan-dukungan yang di, merealisasikan dukungan-dukungan yang diperlukan oleh Pertamina.

Jadi itu saja, Bu, singkat. Saya mohon, mudah-mudahan ada *call center* untuk komplain yang bisa kami punya, sehingga Pertamina selalu siaga untuk mengantisipasi, mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Yang penting jangan selalu merasa oke-oke saja, tapi ternyata masalah, dan bukan rakyat yang mengalaminya, saya sendiri mengalaminya ya. Setiap saya ke dapil selalu mengalami masalah bahan bakar yang tidak ada di SPBU.

Demikian, Pimpinan.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Oh iya terakhir tentang, tadi Bu dari PKS mengatakan jangan sampai masyarakat kaget naiknya LPG, tetapi juga penting Bu bahwa ternyata selain Bu PKS juga survey, saya juga survey. Ternyata pemakai LPG itu juga, saya kadang-kadang banyak mengkritik PNS-PNS di daerah yang masih pakai LPG3 kilo. Saya mengatakan "Itu dzolim, itu punya, itu hak rakyat, jangan menggunakan LPG 3 kilo". Jadi, pendataan siapa yang berhak untuk LPG 3 kilo ini juga penting.

Demikian.

*Wabillahitaufig wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.*

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bu Andi, itu kalau terkait kontak person tadi sudah ada juga tuh. Saya pikir ini nanti bisa saya informasikan juga. Nah, kebetulan tadi saya pas lagi lihat-lihat itu, itu lengkap itu. Pak Alfian, ini untuk urusan-urusan Satgas-satgas ini kan Pak ya? Jadi, pokoknya kalau ada masalah apa di lapangan, kontak mereka-mereka inilah ya. Jadi, saya rasa ini bisa sekaligus nih informasi buat teman-teman Komisi VII, diinformasikanlah ke seluruh *stakeholder*-nya.

Saya tambahkan terkait yang disampaikan oleh Bu Andi mengenai data orang miskin. Dari awal sebetulnya ini kuncinya, bolanya ada di pemerintah, karena pada akhirnya, sebetulnya, sejatinya kita semua setuju kok kalau kita mulai mau merubah sistem subsidi. Jadi, saya ulang kembali ya ini biar lurus, jangan sampai terjadi tafsir-tafsir yang berbeda. Subsidi tidak dicabut, tapi

merubah metode subsidi yang awalnya menggunakan metode subsidi terbuka, berubah menjadi metode subsidi tertutup. Itu dulu ya.

Nah, namun konsekuensi dari melakukan sistem subsidi tertutup dari tahun-tahun lalu kita sudah mendorong, segera perbaiki DTKS itu, data orang miskin itu, supaya problematika yang tadi seakan-akan sekarang carut-marut, *teu pararuguh*, lingkaran setan dan lain segala macam ini segera terselesaikan. Minimal kalau yang kita pahami, pada saat ini bergeser kepada subsidi tersistem dengan metode sistem, eh subsidi tertutup, saya melihatnya terjadi sebuah penghematan yang sangat luar biasa. Jadi, terkait mengenai LPG 3 kilo ini jauh lebih tepat sasaran sebetulnya. Nah, jadi saya rasa kita juga mendorong. Dan di Rapat Banggar juga, dan di beberapa teman-teman komisi lain juga sudah mendorong itu. Jadi, sebetulnya silakan segera diberesi. Kalau saya lihat, kurang lebih 7 bulan kalau serius, itu bisa beres kok membenahi sistem data orang miskin itu. Data terpadu ya, data terpadu orang miskin itu. Sebetulnya kalau memang serius itu bisa beres. Data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi supaya.

INTERUPSI F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Iya?

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Soal subsidi tertutup itu, itu awal periode kemarin sebenarnya sudah dimulai waktu Menteri ESDM-nya Pak Sudirman Said, Dirjenya Migas Pak Professor. Waktu itu dari Pertamina yang selalu apa namanya, PIC-nyalah yang langsung komunikasi itu Pak Direktur Pemasaran, Pak Bambang. Pak Bambang yang ya, kebetulan sekarang sudah almarhum. Nah, ini sudah terus, sudah diujicoba tarakan tuh oleh Dirjen Migas sama Kementerian ESDM, tapi nggak berhasil. Anggarannya sudah cukup besar juga, nggak berhasil juga. Sampai waktu itu juga ada kebetulan yang mengajukan suatu perusahaan *startup* yang membuat sistem kontrolnya yang bisa betul-betul bagus, tetap nggak bisa juga. Artinya, oleh pihak Kementerian ESDM, kalau anggaran secara sistem kontrol secara nasional, anggarannya besar, nggak siap juga. Tapi dibuat *pilot project* di kalau nggak salah di Tarakan, kalau itu ..(suara tidak jelas).. tadinya mau di Batam juga nggak jalan, Pak.

Jadi, memang ini sulit. Waktu itu sudah ini menjadi pembahasan yang rutin dan sudah dilaksanakan. Bisa di cek juga ke Kementerian ESDM, dan mungkin waktu Pak Bambang Direktur, siapa yang staf beliau sudah level yang hadir di sini, waktu itu sudah, itu sudah tahu soal itu.

Demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

Point of information saja itu.

KETUA RAPAT :

Terima kasih buat informasinya.

F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya sebentar Pak, nanti aman, aman, tenang aman. Ini masih menambahkan biar tuntas. Jadi, artinya sih Bu, maksud saya, ini juga harus didorong sama-sama untuk penyempurnaan data orang miskin ini. Karena dengan sistem tertutup tadi, kita menggeser yang tadi kita subsidi ke barang kita rubah menjadi subsidi ke orang yang tidak mampunya itu. Jadi, lebih tepat sasaran gitu. Jadi, narasi-narasi, informasi-informasi yang tadi misalnya PNS ikut menggunakan LPG 3 kilo atau restoran-restoran yang pakai LPG 3 kilo yang seharusnya dia masuk dalam kategori pengguna LPG di atasnya, di luar 3 kilo, ini sudah nggak ada lagi. Jadi, kita sudah nggak perlu pusing kalau datanya segera diverifikasi, diperbaiki, kita dorong langsung subsidi ke orang. Artinya, Pertamina juga tidak kena beban yang berat gitu loh untuk meng-cover terlebih dahulu dana subsidi, eh apa, uang subsidi LPG 3 kilo. Saya hanya ikut menambahkan saja, hanya ikut memperdalam apa yang tadi disampaikan oleh Bu Andi.

Silakan selanjutnya ya. Ini terakhir, dua terakhir, habis itu kita serahkan kepada Pertamina dan langsung kita tarik kesimpulan dan kita bisa pulang ke masing-masing untuk persiapan buka puasa di rumah.

Iya, silakan.

F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya, silakan Mas.

F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Iya, baik, Pimpinan.

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita bersama.

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu dalam sore hari ini disaat situasi masyarakat kita menghadapi bulan Ramadhan, di saat itu juga kita menghadapi banyak cobaan dan ujian. Mungkin Ibu Dirut perlu diketahui, bahwa kami anggota DPRRI di Komisi VII itu mendapatkan beban psikologi yang berat di dapil, wilayah. Mungkin kalau Ibu kelak mungkin sudah pensiun, lalu Ibu menjadi anggota Dewan, lalu Ibu menjadi anggota DPRRI di Komisi VII, mungkin akan merasakan beban yang kami rasakan saat ini.

Saya itu punya WA Grup, Bu, satu hari keluar 5 sampai 10 orang dari Wa Grup. Setiap kali saya posting tentang kegiatan saya di Komisi VII, mereka keluar dari WA Grup. Kenapa? "Apalagi yang akan diperjuangkan kenaikan besok, Pak?" katanya. Jadi, kita ini di Komisi VII dikira oleh masyarakat kerjanya untuk menaikkan harga terus. Jadi, kadang-kadang mereka mengirim lagu Iwan Fals gitu. Wakli rakyat ya kan, hanya duduk, diam, tidur, tanpa memikirkan rakyat. Nah ini kan kita malu.

Jadi artinya, terkadang saya sebagai anggota Dewan merasa, kenapa? Bahkan lebih dulu kita mengetahui kenaikan harga di televisi ketimbang kita sendiri yang ada duduk di Komisi VII. Ini sangat aneh, Bu. Harusnya, sebelum Dirut Pertamina memutuskan harga, rapat dulu kita di Komisi VII, bukan tiba-tiba pengumuman ada di media, kita sendiri anggota Dewan nggak tahu apa-apa saja harga yang akan naik. Diskusi dulu, kita rapat dulu di sini, Bu. Untuk apa kita rapat setiap bulan sekali dengan Pimpinan Komisi, apalagi dengan Pak Maman yang ganteng ini, sementara kalau kita sendiri tau harganya naik itu lewat media televisi, kita sama sekali tidak tahu kenapa sebab-musabab harga naik. Kita lagi asyik-asyik melihat perang Ukraina dan Rusia, di saat itu juga kita melihat berita tentang kenaikan harga BBM.

Nah yang kedua, ini terjadi di mana saja, termasuk di dapil wilayah saya Banten 3. Efek daripada menaikkan harga BBM ini menimbulkan banyak persoalan. Pertama minyak goreng ya, itu menjadi kampanye emak-emak itu akibat harga minyak goreng yang naik dan langka. Kedua, datang lagi kelangkaan masalah gula pasir, datang lagi persoalan masalah kenaikan harga telur, lalu sekarang datang lagi kenaikan harga BBM akibat perang Ukraina. Kita betul berhasil kegiatan balap di Mandalika, tapi setelah itu masyarakat sedih lagi. Kok terjadi harga naik? Yang perang kok Rusia sama Ukraina kok kita yang harus jadi beban rakyat?

Ini rakyat kita termasuk sabar, Bu sekarang ini. Saya nggak tahu ini, masyarakat kita ini sabar karena apa akibat Virus Covid-19 atau faktor apa yang menimbulkan masyarakat kita tidak ada sama sekali menimbulkan huru-hara di situasi ini. Mudah-mudahan tetap stabil situasi negara kita ini. Namun, apakah bisa kita biarkan ini terus-menerus berlanjut? Sekarang baru saja isu BBM pertamax naik, Bu. Sama seperti yang disampaikan Bu Andi, saya pribadi itu terasa pas isi apa namanya, bahan bakar, kok harganya luar biasa naiknya. Lalu datang lagi sekarang LPG ya akan naik lagi.

Nah, ini apa solusi daripada Pertamina ke depan? Apakah ada jaminan kalau perang Ukraina usai, besok saya telepon Putin untuk menghentikan perang itu, lalu BBM itu juga akan turun lagi harganya. Adakah jaminan itu dari Dirut Pertamina kalau Putin sudah saya telepon besok untuk berhenti perang. Nah, ini harus ada jaminan dari Pertamina untuk menurunkan harga itu kembali kalau alasannya perang Ukraina yang dipakai. Kalau alasan perang Ukraina yang dipakai, ya tentu alasan itu kalau perang usai, berarti harga juga akan turun. Harus ada itu.

Lalu publik juga harus diberikan Bu keterbukaan yang jelas. Yang pertama masalah minyak dan gas subsidi. Saya melihat minyak dan gas subsidi kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan-keuntungan bisnis, atau keuntungan-keuntungan pribadi. Bagaimana kalau ada solusi, ada yang namanya kartu subsidi sehingga masyarakat yang betul-betul miskin, mereka mendapatkan kartu untuk diskon harga gas, diskon harga bensin.

Lalu mobil, saya nggak paham cara bagaimana manajemen transportasi. Harusnya truk-truk, mobil-mobil truk-truk itu, itu kalau sudah tahu bensin itu langka, bagian manajemen distribusi itu mengatur bagaimana caranya mengisi bensin subuh-subuh saja, jam 1 pagi sampai jam 5 pagi. Jangan diadu Bu, ngisinya di hari yang padat, di jam kerja. Ini menimbulkan macetnya puluhan kilometer di jalan itu. Jadi, kadang-kadang kayak nggak pernah belajar di tol. Kan kita lihat tol tuh, bagaimana jalan tol. Kalau terjadi macet, maka di-over. Mobil truk itu malam baru boleh lewat.

Harusnya kalau memang sudah langka yang namanya solar, cepat itu yang namanya manajemen distribusi Pertamina untuk mengatur semua truk tidak boleh mengisi solar di jam sibuk. Isi solar jam 1 pagi sampai jam 5 pagi untuk menghindari antrian. Karena satu truk itu Bu, isinya itu bukan 10-20 liter, ratusan liter. Nunggunya satu truk itu saja kadang setengah jam loh, Bu, gitu loh, iya. Oh nggak habis-habis itu yang namanya solarnya diisi itu ke mobil-mobil ruk gitu. Ini bagaimana mau bayangkan kalau ada 20-30 truk yang antri? Itu sangat tidak mungkin tidak terjadi kemacetan yang besar.

Maka, dalam kesempatan forum hari ini, saya ingin sekali Bu Dirut selalu mengajak kita curhat dululah sebelum menaikkan harga. Curhat dulu lah ke kita Anggota Dewan, ada apa persoalannya? Kenapa persoalannya? Jangan selalu kami menonton lewat televisi, lalu kami di daerah dianggap oleh masyarakat tidak bekerja. Besok kami nggak terpilih lagi Bu di Komisi VII ini. Jadi, anggota Dewan di Komisi VII, kita di dapil nggak ada masyarakat mau milih kita. Kenapa? Bukan membantu rakyat, menambah penderitaan rakyat katanya anggota Dewan Komisi VII. Jadi kenapa? Karena masyarakat nggak paham. Masyarakat di bawah itu nggak paham dianggap ya kami ini diam di Komisi VI, sementara kami parlemen tugasnya berbicara menyampaikan hal-hal yang perlu kami sampaikan maka kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sekali Ibu Dirut sebelum menetapkan harga, rapat dulu kita di komisi VII. Mohon izin Pimpinan ini perlu diatur hal seperti ini jangan diulang-ulang lagi menaikkan harga BBM tanpa keputusan dari rapat Komisi VII.

Itu saja yang ingin saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf, saya sudah dengan

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Iya memang Pak Zul benar juga yang disampaikan, memang sudah betul-betul politisi mengkritik pemerintah dengan halus, tetapi memang Komisi VII, 50% nggak terpilih, Pak Ketua. Sekarang yang ada di sini hanya bertiga nih yang lama, nanti begitu lagi kalo nggak benar juga jadi kan kita ingin rame-rame semua tetap bersama-sama kan gitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Betul, betul, betul, betul itu jadi semakin menakut-nakutkan ini.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Izin Pak Ketua, Pak Ketua

KETUA RAPAT :

Tapi sebentar, sedikit sebentar, saya mau menegaskan dulu memang kalau terkait pertamax ini kita harus paham dulu walau okelah secara etikanya mungkin Bu, secara urusan kemitraan okelah saya pikir mungkin nanti kalo *next time* nggak ada salahnya kita urung rembuk. tapi harus dipahami dulu kalo terkait pertamax ini memang *B to B*, Pak mekanismenya itu murni domainnya adalah Pertamina dan dalam hal ini Pertamina mau naikan Rp30.000,- pun secara ekstrem ini itu sebetulnya hak nya Pertamina, karena itu bukan barang yang memang disubsidi oleh pemerintah. Itu dulu kita harus samakan frekuensi dulu.

Kerugiannya kalo terlalu tinggi juga Pertamina jual ya akhirnya orang nggak mau beli. Kenapa? Orang akan pilih Shell, akan pilih yang SPBU lainnya, tapi satu hal dulu nih saya membantu, saya setuju juga dengan yang disampaikan oleh Pak Zul. Ini juga untuk mengklarifikasi dan menjelaskan kepada seluruh publik di Indonesia ini, bahwa kontribusi Komisi VII terhadap bagaimana bisa memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang tidak mampu agar bisa mendapatkan LPG 3 kilo dengan harga murah itu luar biasa. Saya berani tegaskan dan saya berani klaim bahwa itu adalah upaya yang sangat luar biasa maksimal dari Komisi VII.

Artinya apa? Bagaimana caranya? Bukan dengan teriak-teriak yang seperti kemarin kita di lapangan itu di daerah Pak Zul. Makanya Pak Zul kemarin bersama-sama dengan kita, kita memperjuangkan untuk menaikkan *volume* kuota LPG 3 kilo. Macam-macam tafsirnya, tapi faktanya hari ini kalau saya boleh cek dan silakan ya Pak Alfian ya, kita boleh cek di lapangan. Saya rasa dari Sabang sampai Merauke ada istilahnya sekarang itu LPG 3 kilo itu banjir. Orang kelelep sama LPG 3 kilo itu. Tapi bagi kami nggak ada masalah, yang penting masyarakat mendapatkan LPG 3 kilo dengan harga yang murah.

Kalau dulu mungkin, jangankan di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan sama pedalaman di Sulawesi Indonesia bagian timur, di Jawa saja masih banyak orang itu tahun lalu mendapatkan LPG 3 kilo itu dengan harga Rp30.000,- sampai Rp40.000,-. Di tempat saya itu, itu ada orang yang beli LPG 3 kilo itu dengan harga Rp70.000,- loh per tabung, tapi hari ini saya berani jamin dan berani pastikan, oke mungkin tidak 100%, tapi saya rasa 95% masyarakat di seluruh Indonesia menikmati LPG 3 kilo dengan harga yang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah, HET, yaitu kurang lebih di Rp18.000,- paling mahal di Rp20.000,- sampai Rp22.000,- -anlah. Saya pikir *range*-nya masih sekitar situ.

Artinya maksud saya Pak zul, iya? Apal. Jadi, enggak, maksud saya gini, supaya jangan sampai kita di, terkesannya bahwa dalam konteks urusan BBM ini kita tidak pro kepada kepentingan masyarakat gitu. Jadi, kasihan juga. Saya mengerti suasana kebatinannya Pak Zul. Sama Pak Zul, saya juga digituin juga, tapi kita harus punya keberanian untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena saya pikir hitam adalah hitam, putih adalah putih. Saya rasa masyarakat juga tidak boleh juga terus diberikan permen terus, karena nanti nggak bagus juga buat giginya dan badannya, tapi kita harus sampaikan kondisi yang riil. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Artinya, komitmen Komisi VII melalui fungsi *budgeting*-nya telah betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat, yaitu terkait LPG 3 kilo dan sepemahaman saya terkait solar kita tidak ada perubahan ya Pak ya? Solar yang subsidi kan nggak ada, jadi sampai hari ini.

Lalu yang kedua, terkait pertalite kita disubsidi nggak Bu? Subsidi dan sampai hari ini belum ada perubahan ya Bu?

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Belum ada.

KETUA RAPAT :

Belum ada.

Lalu yang ketiga, terkait minyak tanah juga sampai hari ini tidak ada perubahan. LPG 3 kilo juga tidak ada perubahan. Jadi, itu adalah bentuk pengawalan kami di Komisi VII. Dan perlu dipahami, kalau ada yang beredar nih. Pak Zul nanti kita sama-sama Pak Zul. Ini kan muncul nih cerita di luar nih bahwa seakan-akan LPG mau dinaikkan. Nggak mudah seperti itu saja loh, itu butuh persetujuan DPR loh, yaitu Komisi VI, silakan saja. Urusan subsidi itu di sini. Jadi, saya pikir tidak semudah itu main langsung dengan gampang mau menaikkan. Artinya apa? Perlu ada pembicaraan antara teman-teman Pertamina, pemerintah dan Komisi VII.

Jadi, saya pikir itu jadi catatan, dan maksud saya, saya hanya ingin tempatkan satu waktu proporsional saja. Jadi, kita mengerti, saya juga sama Pak. Ini mohon dipahami Pak Alfian, Bu Nicke, dan Bapak-bapak semuanya. Teman-teman Komisi VII ini memang habis dibombardir nih kita, dengan segala macam curhatanlah. Kita tidak bilang makian, tapi curhatan dari publik, tapi kita juga harus punya keberanian untuk menyampaikan yang sebenar-benarnya.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Interupsi, Pimpinan sebentar.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Iya, saya menyambut himbauan Pimpinan barusan ya, tetapi juga artinya himbauan ini adalah kepada siapa pun para pihak, tidak mudah juga menyampaikan *statement*, wacana atau apa pun gitu ya. Jadi, kalau belum jelas akan ada perencanaannya, belum dibahas di kita, sudah dilempar kepada masyarakat wacana-wacana naik, ya masyarakat sudah gelisah duluan gitu. Jadi, hematlah perasaan rakyat, jagalah perasaan rakyat, jangan menyampaikan hal-hal yang semakin memberatkan buat mereka gitu, apalagi kalau sebelum dibahas gitu, seperti itu.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih bu masukannya.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-P.GOLKAR (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Pimpinan, izin Pimpinan.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Pimpinan, Willy Pimpinan.

F-P.GOLKAR (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Golkar, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

..(suara tidak jelas)..

F-P.GOLKAR (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Baik, Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh anggota Komisi VII, dan di sini mitra kerja kami Bu Dirut Pertamina, seluruh jajaran, Dari Patra Niaga juga seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini.

Saya hanya ingin menambahkan beberapa poin inti saja, tapi pada intinya kami secara holistik mengapresiasi dengan adanya satgas ya. Karena, ini penting sekali untuk memonitor *supply, demand* dan juga distribusi BBM, terkhusus apa, di masa Ramadhan seperti ini, dan juga menyiasati Idul Fitri ke depannya. Dan tadi disampaikan bahwa, diprediksi akan adanya kenaikan *demand*. Ketika kita berbicara mengenai solar, otomatis ini adalah yang bersubsidi, begitu. Nah, maka kami berharap *monitoring system* ini berjalan dengan baik, dan saya mungkin tambahan saja gitu ya, untuk ke depannya melibatkan apa namanya, penegak hukum dan juga pemda, dalam melakukan *monitoring system* di daerah-daerah, di setiap provinsi untuk saling menjaga. Lalu, kemudian bisa juga menerapkan sistem pengawasan dengan IT ya, dengan apa namanya, pada *nozzle*, dan ini sesuatu hal yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan BPH Migas. Ini tambahan saja dari segi *monitoring system*.

Lalu, kemudian membahas mengenai tadi isu kenaikan apa, harga BBM ya. Tambahan saja, jadi, kami kan berharap bahwasannya subsidi BBM ini kan tepat sasaran gitu. Namun, kita mengetahui bahwa ada prediksi solar yang bersubsidi ke depannya akan meningkat gitu, semakin meningkat ke depannya. Nah, saya khawatir bahwa masyarakat yang sebetulnya tidak berhak untuk membeli BBM bersubsidi, dalam hal ini solar, itu nyatanya di lapangan mereka membelinya, karena melihat harga lainnya itu semakin meningkat, terkhusus dalam hal ini pertamax gitu ya.

Nah, maka saya berharap bahwasannya *monitoring system* di lapangan itu betul-betul berjalan dengan lancar, dengan baik gitu karena kenyataan di lapangan, kami, saya rasa seluruh anggota DPR adalah orang lapangan. Kita merepresentasikan masyarakat sering turun ke lapangan di daerah pemilihan masing-masing, dan melihat realita bahwa kenyataannya adalah sedang dialami kelangkaan solar di beberapa SPBU gitu. Jadi, ini sesuatu hal yang sebetulnya saya ingin menanyakan gitu, sistem *monitoring* selama ini seperti apa? Kalau kembali lagi kita mengandalkan data yang tadi Pimpinan, Pak Maman menyampaikan bahwa masih kurang akurat, saya yakin juga tadi disampaikan oleh anggota-anggota lainnya. Nah, ini harus kita segera perbaiki. Lalu, kemudian bagaimana kita memonitor bahwa yang berhak membeli BBM bersubsidi itu bisa melakukannya gitu. Jangan sampai yang tadi saya sampaikan gitu. Yang sebetulnya tidak berhak, malah membelinya, ini kan tidak *fair* gitu. Jadi, itu yang perlu saya sampaikan.

Lalu yang terakhir, mengenai *sub holding upstream*. Saya ingin mengetahui strategi Pertamina itu seperti apa untuk meningkatkan produksi nasional, apalagi kita kembali lagi ya ingat dengan target apa, produksi, peningkatan produksi 1 juta barrel pada tahun 2030. Bagaimana sebetulnya kontribusi dari Pertamina mengingat Rokan ya kan, lalu kemudian juga ada blok-blok lainnya yang sudah di bawah naungan Pertamina hulu dalam hal ini.

Jadi dua hal inti itu yang ingin saya sampaikan, selebihnya mungkin saya serahkan ke anggota lainnya.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

..(suara tidak terdengar)..

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Beberapa saja mungkin saya akan jelaskan, nanti detailnya kami sampaikan secara tertulis.

Yang pertama kita tadi ada beberapa pertanyaan terkait.

KETUA RAPAT :

Bentar, kok giliran Bu Dirut yang ngomong bagus. Oh, begitu ya ini. *Test, test, test*. Lah, ini juga bisa, ini ada.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Baik.

Jadi, terkait dengan cadangan BBM nasional atau yang biasa disebut *strategic fuel reserve*. Seluruh negara itu memiliki cadangan tersebut. Rata-rata 60 hari, 90 hari, tadi sudah disampaikan juga kan oleh Ibu Mita. Nah sebetulnya, kalau tadi kita bicara mengenai stok, itu sebetulnya stok operasi Pertamina, stok operasional Pertamina, gitu. Itu adalah stoknya. Nah, kalau kita bicara tentang badan usaha yang menjual BBM, bukan hanya Pertamina saja ya.

Jadi, kalau kita bicara *strategic fuel reserve*, ini memang dikelola oleh negara. Ini yang harus menjadi agenda mungkin di Komisi VII. Jadi, kalau kami sekarang 21 hari saja dengan harga sekarang, ini bebannya senilai USD 6,17 miliar. Jadi, untuk apa, *me-maintain* cadangan 21 hari cadangan operasinya Pertamina, ini dananya itu harus *idle money* kita adalah USD 6,7 miliar, itu Bapak. Jadi, kalau sekarang ingin ditambahkan lagi, ya dihitung saja. Kami kemarin berhitung untuk menambahkan ke 30 hari saja itu nambah lagi USD 3 miliar. Tidak sanggup kami. Itu satu ya Bapak/Ibu.

Jadi, kalau mengenai cadangan memang harus ada. Harus ada kebijakan yang ditetapkan di situ, dan harus ada alokasi dana untuk *strategic fuel reserve* yang bisa kemudian menambah ketahanan energi nasional. Yang ada di Pertamina adalah sebagai badan usaha adalah cadangan operasi. Dan menurut kami, dengan sistem distribusi yang ada, cadangan operasi 21 hari sudah cukup untuk menjaga pasokan BBM dan juga LPG. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua tadi, ini apakah sebaiknya kita impor saja yang lebih murah? Bapak/Ibu, Kalau kita melihat, yang namanya penetapan harga produk itu kita tahunya ada *crack spread*. Jadi, selisih antara harga *crude* dengan harga produk. Di masa normal, *crack spread* itu adalah berkisar USD 6 sampai USD 8. Bapak/Ibu, hari ini berapa *crack spread*-nya? Pernah mencapai 51 dolar. Jadi, artinya, hari ini dalam kondisi seperti ini, *supply demand gasoline* maupun *gasoil* ini *deficit*, maka kebijakan terbaik adalah mengoptimalkan produksi kilang. Karena kita sebetulnya kalau dibandingkan dengan pasar ya lebih murah ongkos produksinya.

Hari ini yang membuat BBM itu mahal kenapa? Karena 92% dari ongkos produksi BBM itu harga *crude*. Harga *crude* meningkatnya luar biasa Bapak/Ibu. Kalau tahun lalu itu 60 dolar, makanya di APBN kita menetapkan asumsi 63 dolar per barel, maka hari ini tadi saya *browsing* 118 dolar per barel. Jadi, kenaikannya hampir 2 kali lipat. Malah tanggal 25 Maret, itu naik menjadi 124 dolar per barel.

Jadi, ini kenaikan bukan hanya di Indonesia saja, tapi kenaikannya di seluruh dunia. Kita lihat sekarang, BBM Indonesia itu termasuk yang termurah di dunia. Dan untuk itu, pemerintah itu mensubsidinya luar biasa Bapak/Ibu. Kalau kita lihat di UK, senilai pertamax turbo itu nilainya 44.500 per liter. Lihat di negara lain, semuanya sudah naik. Nah di kita, ini kenaikan tidak terlalu besar. Kenapa? Ya disubsidi.

Untuk solar itu per liter itu disubsidi 7.800. Untuk solar subsidi itu per liter 7.800. Untuk pertalite, subsidiya itu 4.000 sampai 4.500, pertalite. Padahal itu penugasan. Pertamax, nah ini saya juga agak ini juga. Yang menaikkan ron 92 itu bukan hanya Pertamina. Seluruh perusahaan di Indonesia menaikkan, malah harganya lebih tinggi. Perusahaan lain itu naiknya 16.000 sampai 16.000 Pertamina naiknya 12.500 dan untuk itu, Pertamina itu mensubsidi 3.500 per liter. Karena kita BUMN, kita memahami kesulitan masyarakat. Tetapi tidak bisa juga menanggung seluruhnya, karena Pertamina badan usaha. Semuanya juga mengharapkan Pertamina untung kan? Ada deviden. Jadi, mohon dipahami. Perusahaan lain, *competitor* Pertamina naik 16.000 pada ribut *nggak*? Sama loh ron 92 ya.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Izin terakhir Pimpinan.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Jadi itu.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Ibu Dirut,

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Iya?

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Sedikit menanggapi saja. Sebenarnya poin yang disampaikan mengenai masalah kenaikan-kenaikan harga itu adalah, kami di Komisi VII ini, kawan-kawan ini *nggak* tahu ceritanya, yang bersuara itu Komisi VI, tiba-tiba sudah ramai di instagramnya, dan sebagainya. Nah, kami ini merasa kalau ada *problem*, Komisi VII lah seperti yang dikatakan Pak Willy itu sebagai *bumpers*-nya. Nah, kami juga mohon, hal seperti ini dikonsultasikan juga ke Komisi VII, itu saja Bu.

Terima kasih.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Iya, baik Bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Persoalannya yang itu saja kok bu, jadi silakan, silakan.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Iya, terus poin, enggak Pak, agak lapar saja.

Kemudian mengenai ini ya, mengenai sekarang LPG dan sebagainya. Tadi poin dari Ibu Diah sangat relevan ya, karena kalau dilihat sekarang, ini saya bisa lihat data langsung hari ini bahwa LPG itu 93%. Apakah, padahal, 93% adalah untuk keluarga kurang mampu, kemudian untuk UMKM gitu ya, pengusaha Warteg, dan sebagainya. Pertanyaannya, apa betul yang itu tuh 93%? Nah, faktanya hari ini LPG terjualnya tuh 93% disubsidi. Subsidiya berapa? 11.250 per kilo Bu. Jadi, sekali nenteng tuh tabung 3 kilo, itu subsidi dari pemerintah itu 33.750. Jadi, mohon ini juga harus tepat sasaran. Kalau sampai 93%, kan tidak 93% masyarakat Indonesia itu kurang mampu dan jualan warteg kan Pak ya.

Jadi, ini memang yang, tadi saya sepakat kita lakukan *monitoring*. Dan kami juga meminta kepada pemerintah untuk lebih mendetilkan lagi kriteria pengguna, agar Pertamina dan juga APH dengan pemda ini bisa melakukan *monitoring* yang lebih baik di lapangan dan juga penindakan.

Kemudian untuk solar. Bapak/Ibu, solar subsidi hari ini 95% di apa, dikonsumsi oleh masyarakat, padahal itu adalah untuk angkot gitu ya, kemudian untuk, mungkin apa? Ya kebanyakan adalah untuk logistik, yang bahan kebutuhan sehari-hari. Pertanyaannya, apakah itu 95% dari total konsumsi? Ya, jadi memang masalahnya sekarang juga bagaimana kita kemudian mengendalikan. Nah, kami juga mengusulkan kepada ESDM untuk segera juga merevisi atau mendetilkan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Kriteria yang Berhak Mendapatkan BBM Subsidi. Karena kalau ditanya ada sekarang, ya semua dapat. Nah, kalau semua dapat, ya seperti ini.

Kenapa kok Pertamina seperti tidak siap-siap? Bapak/Ibu, yang namanya subsidi ini, barang subsidi kan ada kuotanya. Jadi, kalau untuk solar subsidi itu kan kuotanya 15 juta KL, 14 juta untuk *retail*, 1 juta untuk industri kecil. Nah, itu dengan asumsi katanya waktu itu kan 3,5% pertumbuhan ekonomi. Hari ini, ini sudah *over* kuota sampai 13%, yang minggu lalu kita bertemu baru 10% Bapak/Ibu, hari ini kita sudah *over* kuota 30% yang secara peraturan harusnya kita tidak boleh *over* kuota, karena ini adalah anggaran di APBN, ini adalah uang rakyat gitu ya. Jadi, harusnya kami sudah tidak boleh menjual.

Nah, namun kemudian kami menyadari bahwa mobilitas sudah naik, *demand* juga naik. Maka atas izin pemerintah, pada awal, pada minggu kedua Maret kita sudah mulai membuka kerannya. Walaupun *over* kuota, kami tetap isi. Namun, kalau ini dilanjutkan, maka akan terjadi *over* kuota, tambahannya 2

juta KL. Ini tambahannya kalau kita tidak lakukan pengendalian gitu ya. Tapi hari ini kami menyadari, kebutuhan tinggi, Ramadhan, Idul Fitri. Walaupun *over* kuota, *over* kuotanya sudah seluruh daerah Bapak/Ibu. Kami tetap *supply*.

Kenapa kok tidak stoknya banyak, tapi ini? Karena stok itu kan ada PSO, non-PSO dengan berbagai jenis. Yang lainnya tidak ada kuota, tapi untuk yang solar, pertalite, ada kuotanya. Pertalite itu 23 juta KL, solar 15 juta KL yang ini sebenarnya *nggak* boleh melebihi, karena ada anggaran negara di sana. Gitu, Bapak/Ibu.

Nah, untuk *monitoring*, kami sebetulnya memiliki digitalisasi SPBU yang *ter-connect* dengan EDC, saya juga bisa lihat di sini. Jadi, tadi ketika Ibu/Bapak menyampaikan daerah mana, saya bisa cek. Ada SPBU kritis produk apa, berapa banyak, di mana, nomor SPBU-nya berapa, ada di sini ya.

Jadi, *call center* yang umum bisa di ini adalah, untuk apa, pelaporan, adalah *call center* 135, Bapak/Ibu. Jadi, telfon ke 135, saya pun memonitor apa saja di 135 itu *complain*-nya apa, laporannya apa, permintaan apa, ada semua setiap hari. *Call center* kami di Bandung juga di daerah-daerah lain yang daerah besar. Jadi, *call center* 135. Jika ada kelangkaan, ataupun, ini banyak juga, operator SPBU yang di ini, ditekan, diancam kalau tidak menjual misalnya ke truk yang mengangkut bahan tambang, gitu. Ini *nggak* bisa Pak aturannya, diancam-ancam. Nah, itu pun sama kita. *Monggo* Bapak/Ibu, 135, dan kami akan segera melakukan intervensi jika ada itu, apa, semuanya kita bisa *crosscheck* di ini.

Kemudian, tadi mengenai digitalisasi, itu pun Ibu Dyah kami digitalisasi sudah per *nozzle* itu ya, sudah, dan itu kerja sama dengan BPH Migas, sehingga setiap hari kami bisa melihat stok di masing-masing SPBU, bahkan per *nozzle*, jenis produk. Saya sendiri bisa lihat di sini dan ini *online, real time*, ini. Mengenai nanti, mungkin yang pembayaran Ibu Ema belum ada ya? Belum ada ya pembayaran dari pemerintah. Belum ada, Bapak/Ibu.

Mungkin sekilas itu saja Bapak/Ibu, apa namanya, mengenai ini. Kemudian tadi menyampaikan juga, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bapak Pimpinan, bahwa ini kan ada BBM atau LPG yang subsidi nonsubsidi. Menurut aturan, BBM yang nonsubsidi, ini kan pemerintah hanya menetapkan formulanya saja, sedangkan keputusannya diserahkan ke masing-masing badan usaha. Dan kami pun ke pemerintah hanya melaporkan. Tetapi untuk yang BBM subsidi, LPG subsidi, karena ini kaitannya dengan APBN, maka itu menjadi otoritas pemerintah yang menetapkan, dan tentu saja ini perlu mendapat persetujuan dari Komisi VII.

Jadi, demikian Bapak/Ibu, nanti detailnya kami akan sampaikan secara tertulis.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih banyak, Bu Nicke.

Saya, kita memahami suasana kebatinan Ibu juga, namun juga memang harus dipahami. Jadi, prinsipnya dalam situasi sekarang ini harus banyak-banyak *wisdom* kita yang harus lebih di depankan, Bu. Karena memang kita ini hidup dalam sebuah situasi yang *extraordinary*. *Pasca Covid* ini memang meluluhlantakan semua situasi, baik situasi regional domestik kita maupun global. Makanya, di satu sisi kami juga Pimpinan Komisi VII mencoba untuk memahami suasana kebatinan teman-teman. Karena memang, contoh kasusnya memang semua langsung nelpon ke kita.

Jadi, kayak tadi disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Zul, dan Pak Willy, ya. Artinya memang itu kan di media sosial itu kan yang muncul setelah Pertamina dengan DPR, ini muncul ada berita. Jadi, enggak, ini sekedar ini saja. Setelah menyepakati kenaikan harga BBM. Artinya ini kan dipelintir sedemikian rupa. Jadi, boleh saya tegaskan Bu ya, kita sama-sama bersepakat loh dalam forum ini, tidak ada kenaikan BBM yang memang berdampak kepada masyarakat tidak mampu. Artinya yang BBM subsidi ya. Artinya yang naik itu adalah BBM, yo? Oh iya, iya iya.

Kita tambah 10 menit ya untuk kesimpulan.

Ya, jadi saya sampaikan pada forum ini, artinya yang naik itu adalah pertamax, turbo ya Bu ya? Pertamax lah pokoknya yang memang itu, silakanlah itu untuk orang-orang kaya dan lain sebagainya, untuk orang yang mampu. Jadi, saya pikir, itu saja. Kita harus sama-sama tahu bahwa Pertamina sudah sangat menderita. Tapi memang, karena memang Pertamina dibebankan dengan penugasan untuk mengamankan kepentingan publik, akhirnya mau tidak mau harus bertahan dalam segala kondisi situasi ini. Jadi, saya pikir itu harus sama-sama ini dulu.

Nah, bahwasannya memang terjadi opini yang beredar, ya coba kita sama-sama mengklarifikasi saya pikir. Sampai hari ini kalau dilihat data yang disampaikan oleh Pertamina, tidak ada sama sekali bahkan, jumlah *volume*-nya pun ditambahkan untuk mengamankan kebutuhan stok lebaran, dari jumlah, dari harga pun masih sama. Jadi, saya pikir *Insyah* Allah ini bisa menjadi komitmen kita bersama.

Namun, memang harus ada solusi jangka panjang, Bu. Ini kita harus sama-sama punya komitmen bersama. Saya dari awal selalu sampaikan mungkin dalam forum ini, Pertamina juga nanti ikut membantu, mendorong kepada pemerintah, kita juga akan mendorong kepada instansi terkait untuk segera realisasikan data terpadu kesejahteraan sosial itu. *Single* data segera diverifikasi betul-betul, agar kita sudah mulai bisa masuk ke situ. Itu Bu, nanti kita masukan dalam kesimpulan ini Bu. Pak Alfian, jadi biar jangan ada lagi polemik gitu loh. Artinya dari awal kita hanya ingin menjaga. Jangan sampai pada saat ini tidak segera diselesaikan Bu, Pak, menimbulkan masalah baru. Jadi, pada saat nanti misal data ini tidak segera diperbaiki, lalu Pertamina masuk kepada sistem subsidi tertutup, menimbulkan polemik yang memang, yang tadi niatnya baik, lalu menjadi permasalahan baru lagi.

Makanya, sebetulnya kemarin kita hitung-hitungan nggak Bu, 4 bulan, 5 bulan kalau memang serius itu bisa kok. Itu sebetulnya kalau memang pemerintah serius, sebenarnya gampang kok. 6 bulanlah itu. Kalau memang digenjut, keluar data yang resmi, didorong masuk, dipakai data itu, dan kalau memang dalam proses perjalanan ada permasalahan, segera dibuat satu tim yang memang dia langsung bisa segera dengan cepat memperbaiki data-data itu.

Ini kan memang *problem*-nya gini Bu, data-data orang miskin itu, misalnya ada 20 juta data orang miskin, lalu tiba-tiba ada kurang lebih 1 juta yang bermasalah, yang tidak tepat. Mau diperbaiki, mekanisme dan prosedurnya luar biasa, harus lewat bawah, lewat ini segala macam. Nah, mungkin bisa dibuat aturan yang memang tidak perlu melalui itu. Jadi, kalau memang ternyata dari Pertamina, dari instansi yang ditunjuk bahwa ini betul-betul masuk dalam kategori orang miskin, segera dimasukkan, biar dia. Jadi, nggak perlu melalui proses birokrasi yang panjang. Kalau memang serius Bu. Jadi, supaya ini *nggak* jadi beban kita semua kan.

Jadi, saya pikir itu ya.

Terakhir dari Pimpinan, habis itu kita masuk ke kesimpulan.

Silakan, Mas Sugeng.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Terima kasih Pimpinan Sidang, Pak Maman Abdurrahman yang sekarang *wise* betul ya, bijak.

Ya, yang terhormat anggota Komisi VII yang hadir melalui apa, langsung maupun melalui *zoom*,

Jadi, apa yang disampaikan dengan situtasi hari ini, memang ada beberapa hal yang nampaknya kita harus nanti berpikir keras termauk di Komisi VII, bahwa ternyata subsidi barang itu menjadi *problem*. Jadi, subsidi, memang ideologi subsidi itu adalah meningkatkan daya beli orang sebetulnya, bukan menurunkan harga barang sebetulnya. Barang itu harusnya memang menemukan titik equilibrium harga sesuai dengan hukum-hukum harga. Bahwa ada intervensi negara dalam konteks harga bisa saja, tapi itu dinikmati oleh semua orang. Karena pada prinsipnya adalah, bahwa hak asasi semua warga untuk mendapatkan barang dengan kualitas dan harga yang sama, itu. Tetapi, juga kewajiban negara agar semua atau orang yang tidak mampu bisa mendapatkan sebagaimana orang yang mampu. Itulah di situ subsidi.

Nah, kedua adalah yang kita garis bawahi di sini juga. Bahwa memang fosil tampaknya sudah menjadi masalah. Dari ini semuanya, apa, mendorong atau menjadi tekad kita bersama agar kita segera masuk ke energi baru terbarukan. Meskipun, juga tanpa mengurangi sama sekali fosil, karena fosil

kaya migas. Kita masih bicara juga nanti *petrochemical* industri yang semuanya kita impor-impor dan sebagainya.

Jadi, sekali lagi saya ikut empatilah. Kalau dikatakan sikap, ya sikap Partai Nasdem sangat empati. Karena saya lihat ada partai yang justru menghujat-hujat, itu kan ya nggak pada tempatnya dalam situasi yang kayak begini. Meskipun situasi masyarakat juga demikian, gitu. Dan itu, situasi ini perlu kita sadari bersama bahwa *crude* itu memang tinggi sekali, harga minyak itu tinggi sekali, harga gas itu juga tinggi sekali. Dan sebagaimana kita tahu juga, bukan sekedar penjelasan dirut, bahwa memang harga BBM 90% nya adalah *crude* gitu loh. Lah, mau bagaimana kalau. Nah, di APBN 2022 kan kita tetapkan ICP (*Indonesian Crude Price*) itu hanya nih, hanya USD 63 per barrel. Sementara, ICP dalam negeri saja itu sekarang sudah 114. Kalau pemerintah itu, padahal di situ lah *crude* dalam negeri yang dibeli oleh Pertamina juga. Padahal, subsidi 77 triliun itu dengan asumsi bahwa *crude*-nya harganya ada 63 dolar saja. Nah jadi ini, kok jadi saya kaya orang Pertamina, kayaknya sudah layak juga nanti bekerja juga di Pertamina lah kurang lebih gitu.

Saya kira itu Pimpinan, apa, hanya sekedar menambahkan kita dalam situasi ini. Kita tetap memperhatikan satu masalah, apa yang dihadapi oleh rakyat, daya beli rakyat harus kita tolong betul-betul, suasana batinnya juga, tetapi juga kita harus melihat juga kemampuan keuangan negara, dan terlebih juga adalah kita harus juga melihat bagaimana BUMN yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi *public service obligation* sebagaimana Pertamina hari ini.

Kita beruntung PLN tidak mengalami nasib yang sama dengan Pertamina. Karena PLN sudah kita *tag* di awal yakni dengan DMO itu bu, Bu Dirut, (*Domestic Market Obligation*), sekaligus DPO (*Domestic Price Obligation*). Nah, nanti untuk hal ini akan kita bicarakan secara khusus untuk Pertamina di sesi yang akan datang.

Saya kira itu.

Terima kasih Pimpinan, kembali ke Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih banyak, Mas Sugeng.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi sedikit Pak Ketua, interupsi sedikit.

KETUA RAPAT :

Oh iya, Mr. Bond, terakhir Mr. Bond.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Ini untuk Pertamina bisa belajar dari studi dan juga uji coba yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Migas bersama Direktorat Pemasaran Pertamina, zaman Pak Bambang Direktur. Sudah ada uji coba seperti yang disarankan Pak Maman. Itu kalau *nggak* salah di Tarakan, jadi di cek di sana. Itu sudah suatu studi yang cukup dalam juga. Artinya, melihat apakah kalau dibuat kebijakan itu, efektif *nggak* jalan di lapangan? Nah, ini yang maksud saya, karena suah ada referensinya, sudah ada prakteknya.

Karena ya maaf saja, kalau kami di DPR ini kadang-kadang membuat undang-undang pun bisa ya, tau-tau sesudah jalan maaf saja. Misalnya seperti undang-undang membahas soal terbentuknya BRIN, kemarin Menteri Ristek 1,5 tahun tidak ada struktur Eselon I, II-nya, itu konsekuensi undang-undang yang dibuat oleh DPRRI bersama pemerintah atas inisiatif DPR. Tapi kadang-kadang begitu, ini realitas di Indonesia ini, belakangan ini, gitu. Jadi, memang, pelaksana-pelaksana di lapangan itu harus lebih proaktif, lebih inovatif gitu, lebih kreatif. Kalau *nggak* menghadapi seperti ini, keadaan ini. Dan bagi pemegang saham, kalau tidak mampu paling diganti. Nah, itu saja.

Jadi itu, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Oke, Mr. Bond.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Pak Pimpinan, boleh saya merespon?

KETUA RAPAT :

Oh, sangat boleh Bu, aduh.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Jadi untuk itu, Pak.

KETUA RAPAT :

Saya justru senang sekali kalau Ibu masih mau ngomong lagi.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Iya, di CNT ya di Palavia, ini sekarang kita sudah sebulan ini mencoba dengan 116.000 data. Kami dapat DTKS sampai 116.000 jumlahnya dari Kemensos, dan Pak Alfian sudah mulai menggunakan melalui MyPertamina. Jadi, kita apa, untuk LPG Pak, kami berikanlah ada subsidi berapa, 10.000 ya? 10.000 per ini, per orang, ada 116.000. Jadi, kami sudah uji coba Pak Ramson, tapi data yang kami dapat memang baru 116.000. Nanti setelah itu kita melihat

kesiapan. Karena untuk menggunakan MyPertamina, apa, untuk itu kan perlu dengan digital ya Pak, perlu dengan *cashless* gitu, itu akan lebih baik. Kita siapkan dari mulai agen, pangkalan, berikut juga dari si masyarakatnya. Jadi, kita sedang uji coba Pak Ramson.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Sedikit Pak Ketua.

Itu yang Rp10 ribu ke konsumen?

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Jadi di, ada di MyPertamina-nya.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terus dia beli harga LPG harga pasar atau harga subsidi?

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Ya sekarang kita sedang uji coba Pak Ramson. Uji cobanya itu dengan harga yang subsidi itu. Ini hanya untuk semacam supaya mereka mau terlibat menggunakan *cashless payment* dengan MyPertamina dengan data DTKS, Pak Ramson.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Tapi belum harga pasar dong?

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Belum.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Oh, ya itu pasti jalan kalau itu Bu.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Maksud saya gini, ini untuk uji coba sistemnya Pak, karena nggak bisa kalau itu dilakukan secara manual. Ini kita harus ada *platform* yang digunakan kan? Nah, ini kita sekaligus gitu. Satu, menguji data DTKS dan kedua menguji platform yang kita punya untuk itu. Nah, baru setelah itu bisa di *scaling up* untuk yang subsidi, Pak.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Nah, yang berat itu apa namanya, menetapkan siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Itu yang bisa bergejolak gitu Bu Dirut.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Mr. Bond.

Saya pikir cukup, kita bisa masuk ke kesimpulan Bu ya, mohon izin ya. Silakan.

Iya, saya masuk ke kesimpulan yang pertama:

1. Komisi VII DPRRI mengapresiasi Dirut Pertamina yang telah membentuk Tim Satgas internal guna mengantisipasi kelangkaan solar dan BBM yang terjadi di masyarakat di dalam, kelangkaan solar dan BBM yang terjadi di masyarakat.

Setuju ya? Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi VI DPRRI mendesak Dirut Pertamina untuk memastikan kelancaran pendistribusian BBM dan LPG, khususnya selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Setuju ya? Ada kata menjelangnya itu. Menjelang dan sesudah Idul Fitri, dan sesudahnya, *oke*. Oh iya, iya, iya, menjelang dan sesudah Idul Fitri. Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi VII DPRRI mendesak dirut untuk meningkatkan kinerja operasional hulu agar produksi minyak nasional dapat terus ditingkatkan guna mendukung target produksi minyak nasional sebesar 1 juta barrel *per day* pada tahun 2030.

Cocok? Pak Budiman? Mantap ya?

(RAPAT : SETUJU)

4. Komisi VII DPRRI mendorong pemerintah terkait pengalihan subsidi di sektor energi dari skema subsidi terbuka menjadi skema subsidi tertutup dengan melakukan validasi data penerima subsidi terlebih dahulu agar tepat sasaran.

Setuju ya? Setuju Bu ya? Artinya begini nih, saya tadi menambahkan dan menegaskan serta mempertebal kembali apa yang disampaikan Pak Sugeng, bahwa filosofi subsidi itu bukan menurunkan harga, tapi *spirit* dari subsidi itu meningkatkan daya beli masyarakat. Itu dulu ya. Jadi, itu yang menurut saya kata kuncinya sebetulnya. Artinya kita harus sama-sama memiliki

sepemahaman, bahwa *spirit* dari subsidi itu bukannya mengurangkan harga, tapi mendorong agar masyarakat itu bisa memiliki kemampuan daya beli. Itu mungkin, gitu loh. Agar tidak terjadi dia distorsi di lapangan. Saya pikir setuju ya?

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau soal kalimat yang terakhir, bisa kita masih perlu berdebat. Karena kalau menaikkan daya beli masyarakat, itu beda dengan pemberian subsidi. Subsidi itu ada dua, subsidi produk dan subsidi *person*. Memang kalau ekonomi yang kapitalistik tidak diperbolehkan subsidi produk. Makanya dulu saya kalau debat sampai, sama penasehat ekonominya Pak SBY, Dr. Syahril soal kenaikan BBM zaman 2004/2009, berapa kali di situ perdebatan kami. Jadi, kalau kita cabut subsidi produk, ini goncang nih, sebentar saja nih bos kita ini goncang. Nah, di situ perbedaannya. Ada saatnya yang subsidi *person*, ada saatnya yang subsidi produk.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Itu tadi penambahan. Poin nomor 4, *oke? Deal or no deal?* Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi VII DPRRI meminta Dirut Pertamina untuk menyampaikan jawaban tertulis paling lambat 13 April, Bu.

Kalau enggak, awas ya Bu ya.

Cukup? Ada lagi Ibu? Dan jangan lupa bu terakhir, kunjungi *website* instagram dari Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Bukan PKS-nya Pak, tapi maksudnya kan semua anggota Komisi VII ini kan punya medsos. Artinya, dan kita semua sebagai wakil rakyat ini pasti meng-*upload* kegiatan-kegiatan kita di tengah masyarakat.

KETUA RAPAT:

Tapi memang yang paling..(*suara tidak jelas*).. PKS bu.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Jadi, kayak keluhan-keluhan itu kan juga muncul. Ya kalau *full* khusus ya, *follow* IG saya, Bu.

KETUA RAPAT :

Jeng, oke Jeng? Cukup ya Jeng?

Terima kasih, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Dirut Pertamina beserta dengan rombongan, resmi kita tutup, dan kita tutup dengan *alhamdulillahirrabbi'alamin*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.16 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002